



fiskal

waspada antisipatif responsif

No ISSN: 2337-6309

KINERJA PEREKOMIAN UNTUK FONDASI APBN 2025

Arah Kebijakan Pembiayaan
Anggaran 2025: Menuju
Transformasi Ekonomi yang
Berkelanjutan

Kinerja Sektor Keuangan
Indonesia: Menghadapi
Tantangan dan Peluang

Pertanian sebagai
Penyebab Sekaligus
Korban Perubahan Iklim:
Tinjauan Kebijakan Fiskal



9 772337 630007

Edisi II/2024



Warta Fiskal dapat diunduh melalui website
fiskal.kemenkeu.go.id



Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI

Penanggung Jawab:

Dini Kusumawati

Dewan Redaksi:

Syahrir Ika, Endang Larasati, Sofia Arie Damayanty,
Agunan P. Samosir, Hadi Setiawan,

Tim Redaksi:

Fatima Medina Septiyanti, Cornelius Tjahjaprijadi, Rita
Helbra Tenrini, Sidiq Suryo Nugroho, Afif Hanifah,
Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, Indha Sendary,
Chintya Pramasanti, Cessa Seftari, Indrawan Susanto,
Catherine Natantya Widyanti, Mohamad Nasir, Angga
Eko Prasetyo Wirastomo, Anggi Pratiwi

Desain Grafis:

Mochammad Bentar Prakoso

Sekretariat:

Lutfi Nursela Feninsa



APBN 2025 : Menjaga Kestinambungan Agenda Nasional

Syahrir Ika¹

Pemilu Presiden telah usai, Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia Terpilih 2024-2029. Siapapun yang menjadi Presiden RI, harus dipastikan bahwa dalam masa transisi pemerintahan, ada titik kritis yang perlu dikompromi dan dijaga, yaitu '*menjaga kestinambungan agenda nasional*'. Menkeu Sri Mulyani memilih tema ini dalam merancang APBN 2025 (dpr.go.id).

Menurut Menkeu, APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda pembangunan menuju

Indonesia Emas 2045. Meski begitu, Menkeu menekankan dibutuhkan kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan. Cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa. Dukungan parlemen penting untuk memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyusun APBN Tahun 2025.

Fraksi-fraksi di DPR berpendapat terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Menkeu menyampaikan bahwa kebijakan optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*) dilakukan dengan senantiasa menjaga iklim investasi dan usaha yang tetap kondusif serta keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah secara konsisten terus melanjutkan penguatan *spending better* agar belanja lebih efisien dan efektif, serta semakin

¹Dewan Redaksi Warta Fiskal

produktif untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan (dpr.go.id).

Catatan penting APBN 2025 adalah visi ekonomi Prabowo, *'Membawa Ekonomi Indonesia Melambung Tinggi'*. Prabowo yakin bahwa hal ini dapat terwujud dengan upaya yang tepat. Ia berencana untuk melanjutkan program-program yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, terutama dalam hal hilirisasi dan ketahanan pangan, serta fokus pada sektor energi (rri.co.id). Program-program tersebut dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dengan demikian karakter APBN 2025 adalah penataan utang belanja negara untuk membuat fondasi dalam mendukung kebutuhan sektor-sektor prioritas ini. Strategi anggaran untuk mendukung pembiayaan pembangunan juga harus berifat inovatif dan *breakthrough*.

Kita tidak dalam posisi memperdebatkan visi Prabowo, karena sudah menjadi *political decision* sang presiden baru yang harus kita jalankan bersama. Cara mencapai visi itulah yang perlu dirancang dengan *road map* yang jelas termasuk dalam hal anggaran. Target harus dipasang sejak awal, lalu kebijakan dan regulasi dirancang, sebagian bisa dilanjutkan, tetapi sebagian lain perlu diubah dan disesuaikan. Paradigma kebijakan lama yang bersifat *'linier'* mengikuti pola yang

konsisten dan prediktif, harus diganti dengan kebijakan yang bersifat *non-linier* atau eksponensial. Hal ini melibatkan dinamika yang kompleks, ketidakpastian dan efek yang tidak langsung atau tidak proporsional dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berinteraksi, yang bisa jadi hasilnya tidak mudah diprediksi. Ibarat bermain selancar di gelombang besar, bila semua risiko bisa dikelola maka hasilnya akan "menakjubkan" pada masanya.

Basis data yang digunakan bisa memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mengumpulkan data sosial dan ekonomi yang lebih akurat. Juga, menggunakan teknologi digital untuk otomatisasi proses anggaran dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Pertimbangkan juga perencanaan anggaran yang berbasis skenario dengan bantuan AI untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan masa depan dan dampaknya terhadap anggaran. Terakhir, yang tidak kalah penting, membangun partisipasi publik melalui pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan transparansi dalam proses pencairan anggaran, memungkinkan penyesuaian yang cepat dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan masyarakat. Inilah "hal baru" yang biasanya muncul saat pergantian pimpinan sebuah negara, organisasi, atau

perusahaan. Ini perlu untuk merealisasikan visi Presiden baru.

Visi *'Prabowonomics'* kurang lebih mirip dengan visi *"Abenomics"*, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Paket kebijakan ekonomi Abe terdiri dari tiga 'panah' utama, yaitu pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Tujuannya untuk mengatasi deflasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Reformasi struktur ekonomi Abe, dilakukan dengan mengubah sistem ekonomi dan sosial Jepang, termasuk deregulasi dan reformasi pasar tenaga kerja. Fenomena Jepang saat Abe kurang lebih mirip dengan Indonesia saat ini, ada penurunan permintaan konsumen sehingga mengurangi permintaan agregat. Pendapatan Perusahaan juga menurun yang bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja dan penurunan investasi. Dan, terakhir, nilai utang meningkat karena jumlah uang yang harus dibayar tetap sama tetapi pendapatan menurun. Selamat datang *'Prabowonomics'*.

Demikian editorial, selamat membaca.

DAFTAR ISI

FOKUS

- 6** Bagaimana Ekonomi Global Berdampak pada Ekonomi Indonesia?
- 12** Arah Kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025: Menuju Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan
- 17** Respons Fiskal pada Tujuan 'Berkelanjutan': Antara Pembangunan dan Pertumbuhan

ANALISIS

- 22** Kinerja Sektor Keuangan Indonesia: Menghadapi Tantangan dan Peluang
- 25** Menimbang Pemanfaatan Insentif Perpajakan
- 30** Pertanian sebagai Penyebab Sekaligus Korban Perubahan Iklim: Tinjauan Kebijakan Fiskal

34 INSPIRASI, SERBA-SERBI, RENUNGAN

41 FISKALISTA, RESENSI, GLOSARIUM



Bagaimana Ekonomi Global Berdampak pada Ekonomi Indonesia?²

Mohamad Nasir³

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara di dunia kemungkinan besar akan merasakan dampak yang terjadi pada negara lainnya, terutama negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, India, Jepang, dan lainnya. Yang membedakan hanya pada tingkat *magnitude* atau besaran yang dirasakan oleh negara yang bersangkutan. Dampak yang dirasakan pun tidak selalu negatif, dimungkinkan juga berdampak positif bagi negara bersangkutan. Sebagai contoh, permasalahan geopolitik Rusia dan Ukraine yang berdampak

pada kenaikan harga minyak dapat memberikan dampak positif bagi negara yang mengalami surplus produksi minyak dan berdampak negatif bagi negara yang mengalami defisit minyak.

Indonesia menyadari akan dampak perubahan ekonomi global pada ekonomi nasionalnya, di mana Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbuka, melakukan transaksi dengan dunia internasional. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia ikut dalam transaksi perdagangan internasional

akan barang dan jasa melalui kegiatan ekspor dan impor. Indonesia juga membuka kesempatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi investor luar negeri. Investasi langsung dapat berupa investasi pada sektor riil dengan membuka usaha seperti membangun pabrik, dagang, dan lainnya. Sementara itu, investasi tidak langsung, investor dapat menanamkan modalnya melalui pembelian surat berharga yang dapat berupa saham dan atau surat utang.

Adanya keterkaitan antara Indonesia dengan ekonomi global tentunya akan memberikan konsekuensi

²Merupakan pandangan pribadi, bukan pandangan institusi tempat penulis bekerja.

³Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

bagi Indonesia ketika terjadi perubahan atau gejolak yang signifikan pada ekonomi global, termasuk apa yang terjadi saat ini dan beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh terjadinya gejolak geopolitik atau konflik antara Rusia dengan Ukraina. Konflik yang terjadi menyebabkan harga migas meningkat, dan berpengaruh juga pada negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia (Bakrie et al., 2022). Bagi Indonesia, kenaikan harga migas juga menekan fiskal karena terjadi kenaikan belanja subsidi BBM dan LPG (Permana, 2022). Selanjutnya kenaikan harga minyak berdampak pada peningkatan inflasi (Wardani et al., 2022).

Merujuk pada paragraf di atas, artikel ini bermaksud untuk menguraikan tentang hubungan ekonomi global dengan ekonomi Indonesia. Pembaca diharapkan dapat memahami dampak perubahan ekonomi global terhadap ekonomi di Indonesia.

Pengaruh Ekonomi Global Pada Ekonomi Indonesia

1. Alur Pengaruh Ekonomi Global

Dalam teori ekonomi pada umumnya, aktivitas ekonomi didasari pada kondisi yang disebut dengan kelangkaan (*scarcity*) atas faktor-faktor ekonomi atau barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia, di sisi lain manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Dengan kata lain,

terjadi *gap* antara kebutuhan manusia dengan pemuas kebutuhan atau barang dan atau jasa. Selanjutnya, kumpulan manusia yang disebut masyarakat dan hidup pada suatu negara, mempunyai perbedaan dengan masyarakat yang hidup pada negara lainnya. Secara umum, masing-masing negara mempunyai sumber daya alam yang berbeda, menguasai keahlian dan teknologi yang berbeda, dan juga belum dapat memenuhi kebutuhannya. Berangkat dari perbedaan-perbedaan ini, masing-masing masyarakat pada suatu negara mempunyai ketergantungan dengan masyarakat dalam negara lainnya.

Dalam siklus aktivitas ekonomi, hubungan antara masyarakat suatu negara dengan masyarakat pada negara lainnya dapat digambarkan dalam gambar-1. Sebagai contoh, masyarakat internasional melakukan impor atas barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri, dan melakukan ekspor atas

barang dan atau jasa ke dalam negeri. Pertanyaannya, bagaimana kalau kegiatan impor (permintaan) luar negeri mengalami penurunan? Jawabannya adalah aktivitas produksi atas barang atau jasa di dalam negeri akan berpengaruh atau menurun. Selanjutnya, ketika aktivitas produksi menurun maka jam kerja tenaga kerja menurun, kemudian gaji (pendapatan) yang diterima pegawai menurun, dan akhirnya daya beli pegawai akan menurun. Masih ada contoh lainnya yang dapat menunjukkan hubungan ekonomi global dengan ekonomi nasional atau dalam negeri seperti kegiatan ekspor yang dilakukan masyarakat internasional.

Secara kuantitatif hubungan ekonomi dalam negeri dengan ekonomi Internasional dapat diketahui melalui formula perhitungan pendapatan *domestic* bruto yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran yaitu $PDB = C + I + G + X - M$. Di mana PDB adalah produk domestik bruto,

Gambar 1. Siklus Aktivitas Ekonomi



Sumber : suaranusantara.com. 2024.

C adalah konsumsi, I adalah investasi, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Dari formula di atas, dapat diketahui bahwa PDB berbanding lurus dengan kegiatan ekspor dan berbanding terbalik dengan kegiatan impor. Semakin besar ekspor maka PDB semakin besar. Sebaliknya pada impor, semakin besar impor maka semakin menurun PDB.

Grafik 2. Perkembangan Ekspor Harga Konstan dan Berlaku



Sumber : BPS. 2024.

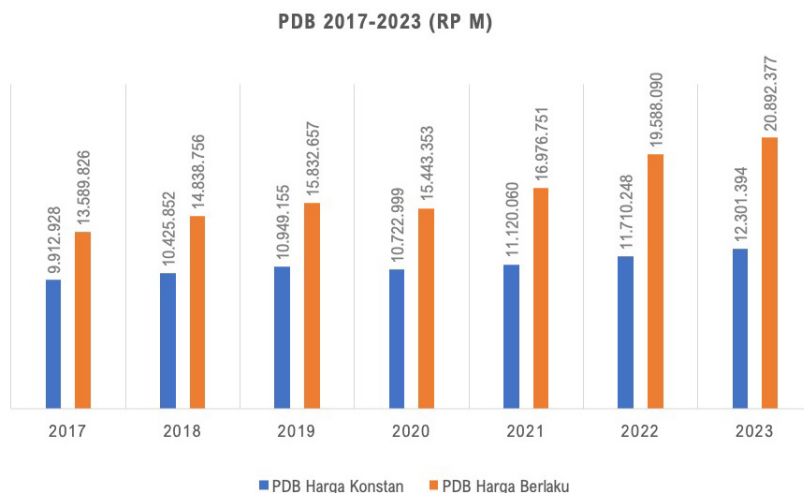
2. Kinerja Produk Domestik Bruto

Ekonomi Indonesia yang tercermin dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2017 s.d 2023 meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID 19. PDB harga berlaku tumbuh 7,4% (CAGR) per tahun, PDB harga konstan tumbuh 3,7% (CAGR) per tahun dalam periode 2017 s.d 2023.

Baik pada PDB harga berlaku dan harga konstan, konsumsi rumah tangga adalah penggerak utama dari aktivitas ekonomi nasional. Terhadap PDB, kontribusi konsumsi rumah tangga rata-rata mencapai 53,6% (harga konstan) per tahun dan 55,1% (harga berlaku) per tahun selama tahun 2017 s.d 2023. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) rata-rata 32,1%

(harga konstan) per tahun dan 31,1% (harga berlaku) per tahun dalam periode yang sama. Selain konsumsi dan PMTB, PDB dipengaruhi oleh kegiatan ekspor dan impor. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh ekspor dan impor terhadap PDB selama kurun waktu 2017 s.d 2023?

Grafik 1. Perkembangan PDB Harga Konstan dan Berlaku



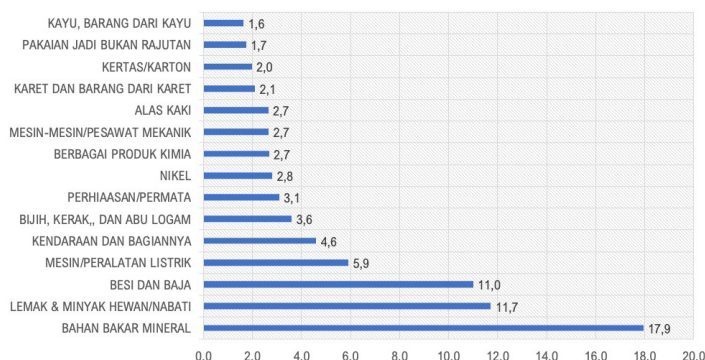
Sumber : BPS. 2024.

3. Pengaruh Ekonomi Global Melalui Jalur Ekspor

Berdasarkan harga berlaku, rata-rata ekspor berkontribusi 20,7% per tahun terhadap PDB. Sementara itu, dengan harga konstan, ekspor berkontribusi sebesar 22% per tahun. Tentunya besaran kontribusi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekspor mempunyai dampak ekonomi yang sangat signifikan. Selain itu, kegiatan ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan CAGR 5,1% per tahun (harga konstan) dan 7,4% per tahun (harga berlaku) sepanjang tahun 2017 s.d 2023.

Berdasarkan komoditi, ekspor Indonesia didominasi oleh

Grafik 3. Top 15 Komoditi Ekspor Indonesia Tahun 2023 (USD Juta)



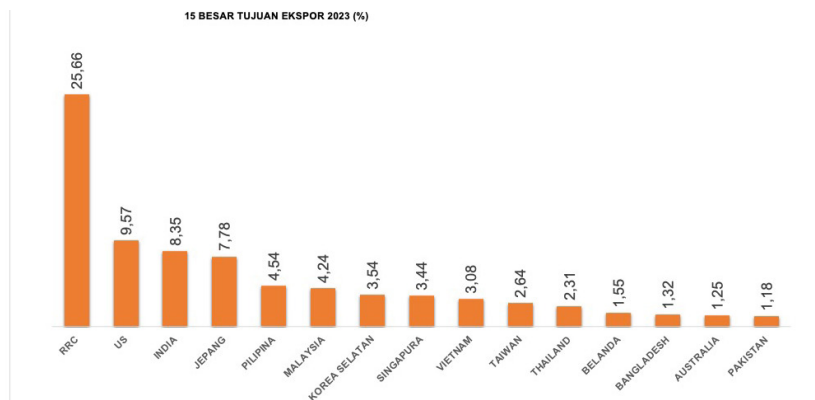
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag. 2024.

ekspor non migas yang rata-rata mencapai 93,2% per tahun terhadap total ekspor dalam periode 2017 s.d 2023. Sementara itu, ekspor migas rata-rata mencapai 6,8% per tahun dalam periode yang sama. Selanjutnya, berdasarkan data ekspor non migas tahun 2023, komoditi bahan bakar mineral berkontribusi terbesar sebesar 17,9% terhadap nilai ekspor non migas, disusul lemak & minyak hewan/nabati 11,7%, besi & baja 11,0%, dan mesin & peralatan listrik sebesar 5,9%. Dari 15 jenis komoditi di atas, komoditi nikel adalah komoditi ekspor yang

mengalami perkembangan yang signifikan. Dari nilai USD813,2 juta pada tahun 2019, menjadi USD6.815,6 juta pada tahun 2023, atau meningkat 8,4 kali lipat.

Berdasarkan tujuan ekspor non migas, sebagian besar ekspor Indonesia pada tahun 2023 ditujukan ke China dengan proporsi yang mencapai 25,7%. Kemudian disusul ke Amerika Serikat dengan proporsi 9,57%, India 8,35%, Jepang 7,78%, Filipina 4,54%, Malaysia 4,24% dan seterusnya. Data proporsi ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia mempunyai

Grafik 4. Top 15 Negara Tujuan Ekspor Indonesia



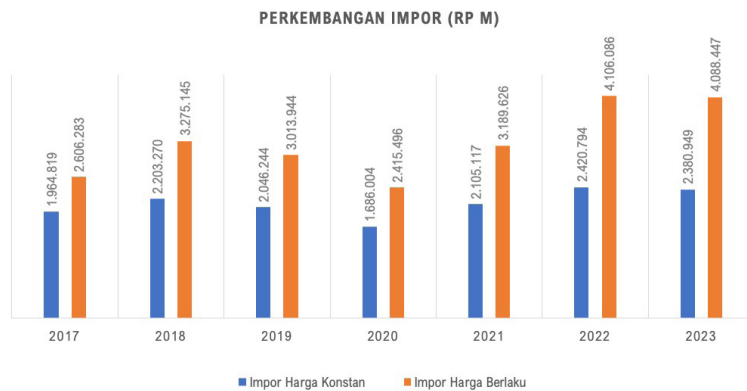
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag. 2024.

ketergantungan yang relatif besar pada permintaan dari China, Amerika Serikat, India, Jepang, Filipina, dan Malaysia, dan tentunya permintaan dari negara-negara tersebut juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi mereka. Keiko Hubbansyah & Wurdaningsih (2019), dengan menggunakan data observasi 1993Q1-2017Q2, menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi China 1,9% berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,85%. Sementara itu, Abimanyu (2017) melaporkan kenaikan PDB per kapita di China sebesar 1% dapat mendorong kenaikan ekspor Indonesia ke China sebesar 2,43%.

Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, kontribusi ekspor terhadap ekonomi nasional sangat signifikan, dan kondisi ini menunjukkan pula adanya ketergantungan pada permintaan barang dan atau jasa dari negara-negara lainnya. Kondisi ekonomi negara tujuan ekspor dan jenis komoditinya harus dipantau dan dicermati dengan baik. Dari hasil pemantauan, dapat diambil kebijakan-kebijakan mitigasi yang diperlukan. Sebagai contoh, ketika ekonomi China melemah dan permintaan akan *crude palm oil* (CPO) menurun, dapat diambil kebijakan penajagan tujuan ekspor ke negara-negara lainnya.

4. Pengaruh Ekonomi Global

Grafik 5. Perkembangan Impor Harga Konstan dan Berlaku



Sumber : Badan Pusat Statistik. 2024.

Melalui Jalur Impor

Kegiatan impor juga menunjukkan pengaruh yang tidak kalah signifikannya bagi ekonomi Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di sub bab sebelumnya, di mana berbeda dengan ekspor, impor berpengaruh sebaliknya atau negatif terhadap ekonomi dalam negeri. Semakin besar impor, ekonomi atau PDB semakin menurun.

Kegiatan impor Indonesia sepanjang periode 2017 s.d 2023 mencapai rata-rata 19,3% per tahun terhadap PDB harga berlaku, dan rata-rata 19,2% per tahun harga konstan. Sepanjang periode ini, nilai impor harga berlaku tumbuh 7,8% per tahun, dan nilai impor harga konstan tumbuh 3,3% per tahun.

Berdasarkan penggunaan barang, impor Indonesia sebagian besar berupa bahan baku dan barang penolong rata-rata sebesar 74,4% per tahun selama periode 2017 s.d 2023. Sisanya berupa barang konsumsi sebesar 9,5% per tahun dan barang

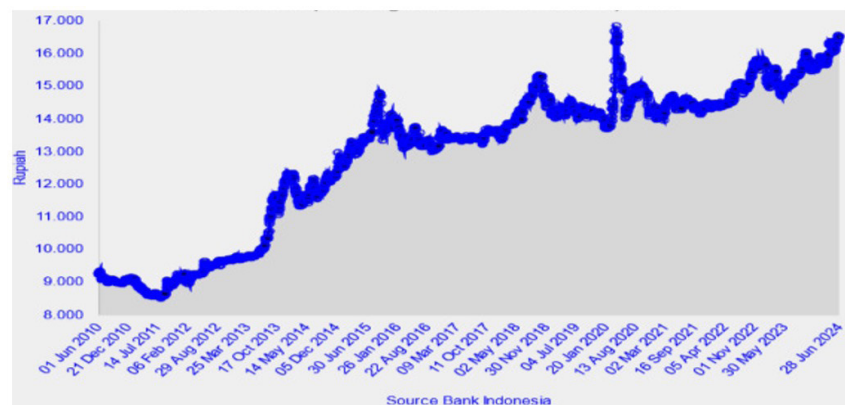
modal sebesar 16,1% per tahun dalam kurun waktu yang sama. Merujuk dari jenis penggunaan barang, Indonesia mempunyai kesempatan untuk melakukan substitusi atas produk impor tersebut dengan produk dalam negeri.

suku bunga internasional.

Pertama, dampak ekonomi global terhadap ekonomi nasional melalui kurs mata uang Rupiah. Depresiasi nilai Rupiah terhadap USD dapat menyebabkan kenaikan harga barang impor seperti barang konsumsi, bahan baku, bahan penolong, dan barang modal (Machmud, 2020), meskipun di sisi lain menguntungkan bagi kegiatan ekspor. Harga barang akan menjadi lebih mahal, dan selanjutnya dapat berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat, konsumsi, dan kegiatan investasi.

Telah diuraikan di atas bahwa impor Indonesia sebagian besar berupa bahan baku dan penolong yang mencapai 74,4% per tahun selama 2017 s.d 2023. Di lihat dari sifatnya yang merupakan input

Grafik 6. Perkembangan KURS Rupiah Terhadap USD



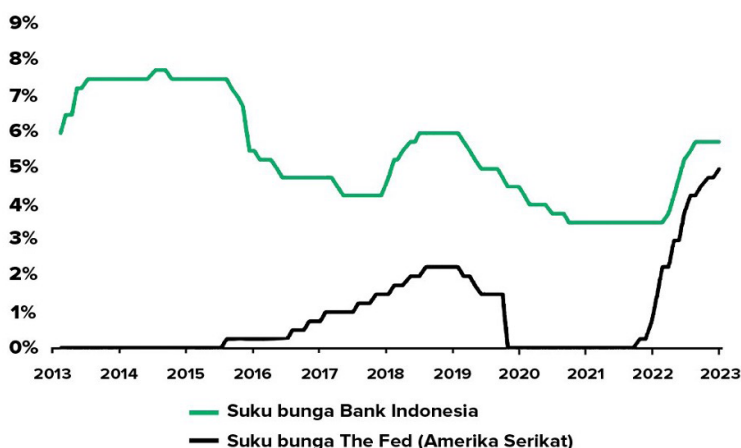
Sumber : Bank Indonesia. 2024.

5. Pengaruh Ekonomi Global Melalui Pasar Uang

Selain dampak ekonomi global pada ekonomi Indonesia melalui aktivitas ekspor dan impor, dapat juga melalui perubahan kurs USD terhadap Rupiah dan perubahan tingkat

produksi, produsen dalam negeri yang bahan baku nya mengandalkan dari impor akan berdampak, biaya produksinya akan menjadi lebih mahal sehingga dapat mengoreksi daya beli masyarakat. Hal yang sama pada impor atas

Grafik 7. Perkembangan Suku Bunga Bank Indonesia dan The Fed



Sumber : Bloomberg . Per 21 Juni 2023. <https://blog.bibit.id/blog-1/the-fed-tahan-suku-bunga-apa-dampaknya-buat-investasi-kamu>.

barang modal. Harga mesin impor akan meningkat, dan dapat berpengaruh pada biaya produksi melalui peningkatan biaya depresiasi barang modal tersebut.

Kedua, pengaruh ekonomi global dapat mempengaruhi ekonomi nasional suku bunga internasional. Yang biasa terjadi adalah peningkatan *fed fund rate* oleh bank sentral US dapat mendorong Bank Indonesia meningkatkan suku bunganya (Maisah, 2023). Ketika suku bunga meningkat, beban bunga akan meningkat, biaya produksi meningkat, dan selanjutnya akan berpengaruh pada daya beli masyarakat atau konsumsi. Kenaikan suku bunga *the fed* dimungkinkan berpengaruh pula pada penurunan arus modal masuk ke Indonesia. Investor luar negeri, khususnya yang berinvestasi dalam bentuk surat utang dan saham, kurang tertarik menempatkan dananya di

Indonesia. Konsekuensi dapat berpengaruh pada kegiatan investasi dan pembentukan PMTD di Indonesia.

PENUTUP

Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, perkembangan ekonomi global dapat berpengaruh pada ekonomi Indonesia, baik berdampak positif dan negatif. Pengaruh dapat terjadi melalui jalur ekspor, impor dan pasar uang. Berdasarkan data selama periode 2017 s.d 2023, pengaruh ekspor pada ekonomi sangat signifikan dan berasal dari permintaan China. Karenanya, pelemahan ekonomi China yang berujung pada permintaan dapat berdampak pada penurunan ekonomi Indonesia. Berbeda dengan ekspor, peningkatan impor berarti ekonomi Indonesia melemah, dan harus diikuti oleh ekspor. Berdasarkan

data dengan periode yang sama, pengaruh impor juga cukup besar bagi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ekonomi, Indonesia harus berupaya meningkat ekspor dan menurunkan impor. Untuk mengurangi impor, Indonesia perlu melakukan inovasi produk yang dapat mensubstitusi barang-barang impor.

Selain melalui jalur ekspor dan impor, ekonomi global juga dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia melalui pasar uang khususnya kurs mata uang Rupiah dan tingkat suku bunga. Depresiasi nilai mata uang Rupiah dapat mendorong peningkatan biaya produksi dalam negeri mengingat sebagian besar impor Indonesia berupa bahan baku dan penunjang. Ketika biaya produksi meningkat maka dapat menurunkan daya beli atau konsumsi masyarakat. Peningkatan suku bunga internasional, misalnya Fed Interest Rate, dapat berdampak pada tingkat suku bunga dalam negeri Indonesia, dan pada akhirnya berpengaruh pada biaya produksi dalam negeri. Selain itu, kegiatan investasi juga dapat terpengaruh sebagai akibat peningkatan suku bunga dalam negeri.



Arah Kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025: Menuju Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

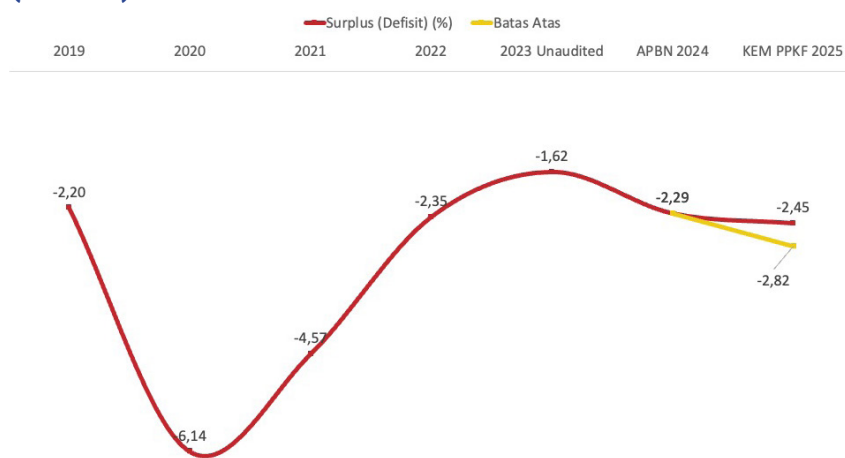
Widodo Ramadyanto⁴

Tak jarang kita mendengar atau melihat berita atau analisis terkait utang pemerintah. Beberapa pihak mempertanyakan kebijakan pembiayaan pemerintah. Utang pemerintah terlalu tinggi, pemerintah terlalu mengandalkan utang, dan berbagai narasi sejenis.

Sementara itu, masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan berbagai hal, berbagai tambahan belanja pemerintah, untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, untuk membangun infrastruktur, dan memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Sumber utama pendanaan APBN adalah dari perpajakan dan PNBPN. Penerimaan pemerintah belum cukup untuk mendanai

Gambar 1. Perkembangan Defisit APBN, 2019-2024 (% PDB)



Sumber : Bank Indonesia. 2024.

⁴Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

belanja atau pengeluaran pemerintah sehingga timbul defisit APBN.

Pemerintah diberikan keleluasaan oleh Undang-undang Keuangan Negara, untuk menetapkan defisit maksimal 3 persen PDB dan rasio utang maksimal 60 persen PDB. Namun demikian, pada saat terjadinya pandemi Covid-19, defisit diizinkan melampaui 3 persen PDB. Pelonggaran defisit ini dilakukan untuk pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada tahun 2022 defisit telah kembali pada level di bawah tiga persen PDB yaitu 2,35 persen PDB.

Strategi Pembiayaan APBN 2025: Menyongsong Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik

Ketika pendapatan negara belum cukup untuk menutupi belanja pembangunan, pembiayaan menutupi kekurangan tersebut. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari utang maupun non-utang. Selama periode 2019-2024, terutama di awal pandemi Covid-19, kebutuhan pembiayaan baik dari utang maupun non-utang meningkat drastis. Defisit APBN tahun 2020 mencapai Rp947,7 triliun atau 6,14 persen dari PDB. Pandemi menyebabkan ekonomi melambat, pendapatan negara menurun, sementara belanja meningkat untuk menjaga daya beli masyarakat dan memulihkan ekonomi. Tantangan

terbesar pembiayaan adalah mendapatkan biaya rendah dengan risiko terkendali. Kebijakan pembiayaan APBN 2025 diarahkan pada pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan strategi utama antara lain:

1. Mengendalikan Defisit dan Pembiayaan dalam Batas Aman dan Berkelanjutan
Pemerintah berusaha memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan dalam jangka panjang, sehingga utang negara tetap terkendali.
2. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Special Mission Vehicle* (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) untuk Mendukung Transformasi Ekonomi-Sosial
Pemerintah berupaya mengoptimalkan peran BUMN, SMV, BLU, dan SWF untuk mendukung transformasi ekonomi. PLN dan Pertamina memiliki peran penting dalam proyek energi terbarukan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. BLU di sektor kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
3. Memperkuat Ketahanan Fiskal untuk Mengantisipasi Ketidakpastian
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi

global, pemerintah memperkuat ketahanan fiskal dengan menyediakan *fiscal buffer*, serta menjaga kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat cepat merespon krisis tanpa mengganggu program pembangunan yang sedang berjalan.

4. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), UMKM, dan Usaha Ultra Mikro (UMi)

Pemerintah fokus pada peningkatan akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang seringkali sulit mendapatkan pinjaman, termasuk MBR, UMKM, serta UMi. Dengan akses pembiayaan yang lebih baik, masyarakat dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan

5. Optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai Buffer Mengantisipasi Ketidakpastian

SAL dapat digunakan sebagai penyangga fiskal yang fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Jika terjadi penurunan pendapatan negara secara tiba-tiba, SAL dapat digunakan untuk menutupi kekurangan tanpa harus menambah utang.

Tren Positif Pembiayaan Utang: Menuju Transformasi Ekonomi yang Lebih Baik

APBN memainkan peran sebagai penyangga ekonomi, dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal. Defisit anggaran berhasil dijaga di bawah tiga persen, dengan Pembiayaan Utang menurun signifikan. Pada tahun 2023, defisit anggaran tercatat sebesar 1,56 persen, dan Pembiayaan Utang sebesar Rp400,65 triliun.

Pembiayaan utang di tahun 2024 dirancang sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, terutama di tengah

penting:

1. Mengendalikan rasio utang
2. Mengutamakan pembiayaan dalam negeri
3. Mengembangkan instrumen utang
4. Pembiayaan kreatif dan berkelanjutan
5. Pengelolaan kewajiban utang
6. Transparansi dan akuntabilitas

Pembiayaan Investasi: Kunci Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

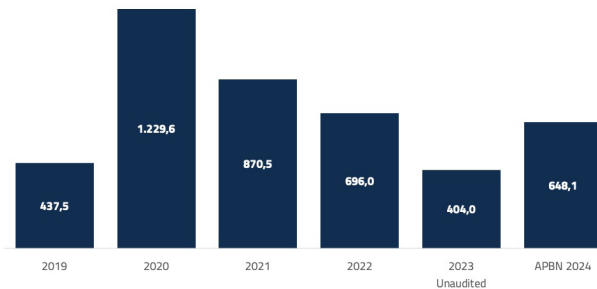
Pembiayaan dalam APBN bukan hanya untuk menutup kekurangan anggaran, tetapi juga untuk menggerakkan roda ekonomi. Salah satu elemen kunci dari pembiayaan ini adalah Pembiayaan Investasi. Pembiayaan Investasi merupakan dana yang dialokasikan pemerintah untuk

diinvestasikan di BUMN, BLU, dan lembaga atau badan lainnya.

Selama lima tahun terakhir, Pembiayaan Investasi terus meningkat. Peningkatan ini terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan dan energi, menyediakan pembiayaan perumahan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khususnya pada periode 2020-2022, banyak dana dialokasikan untuk mendukung program PC-PEN selama pandemi Covid-19.

Pada periode 2019 hingga 2023, sebagian besar Pembiayaan Investasi diarahkan ke BLU, lalu PMN kepada BUMN, dan investasi ke lembaga atau badan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat fokus pada penguatan BLU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi pada BLU diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Gambar 2. Perkembangan Pembiayaan Utang, 2019–2024 (dalam Rp triliun)

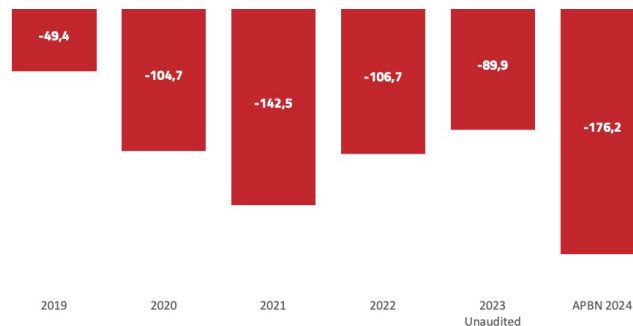


Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

moderasi harga komoditas. Dengan Pembiayaan Utang sebesar Rp648,09 triliun, biaya dan risiko utang terus dipantau agar tetap dalam batas toleransi yang aman.

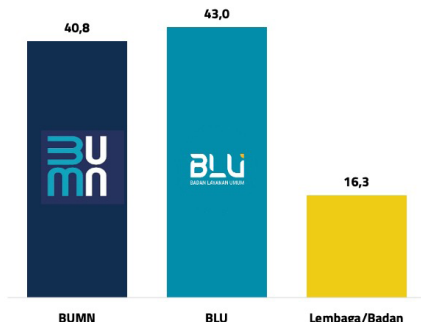
Pada tahun 2025 Pembiayaan Utang fokus pada inovasi, kehati-hatian, dan keberlanjutan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah

Gambar 3. Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2019 – 2024 (dalam Rp triliun)



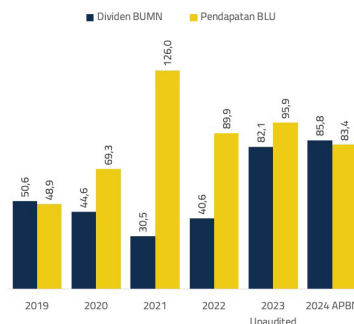
Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Gambar 4. Persentase Total Pembiayaan Investasi kepada BUMN, BLU dan Badan Lainnya, 2019–2023



Realisasi sementara tahun 2023
Sumber: Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, diolah

Gambar 5. Kontribusi BUMN dan BLU dalam Penerimaan Negara, 2019–2024 (dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, diolah

Pada sisi lain, BUMN memberikan kontribusi dividen kepada negara. Dari 2019 hingga 2023, total dividen yang diberikan BUMN mencapai Rp248,39 triliun. Realisasi dividen BUMN pada 2023 mencapai Rp82,06 triliun, naik 102,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain PMN, pemerintah juga memberikan dukungan berupa subsidi/kompensasi, pinjaman, dan penjaminan pemerintah. Dukungan ini antara lain dialokasikan melalui BUMN seperti PT Pertamina, PT PLN, PT Pupuk Indonesia, dan PT Kereta Api Indonesia.

Arah kebijakan Pembiayaan Investasi tahun 2025 ditujukan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas PMN untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
2. Menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi.
3. Mendorong penguatan SMV dan SWF serta sinergi

dengan BUMN, BLU, dan badan hukum lainnya.

4. Mendorong peran BLU dan BUMN sebagai agen pembangunan dan dukungan pembangunan melalui skema KPBU.
5. Meningkatkan kontribusi BLU dan BUMN pada penerimaan negara.
6. Mendukung pengembangan pasar keuangan/ pembiayaan dan inovasi skema pembiayaan.

Pemberian Pinjaman: Solusi untuk Pembangunan Nasional

Bentuk pembiayaan lainnya adalah pemberian pinjaman kepada BUMN dan Pemda. Pemberian pinjaman ini bertujuan untuk mendukung belanja modal, terutama untuk proyek-proyek yang ditugaskan oleh pemerintah. Sementara itu, pinjaman kepada Pemda bertujuan untuk membantu pengembangan daerah, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta berkontribusi pada

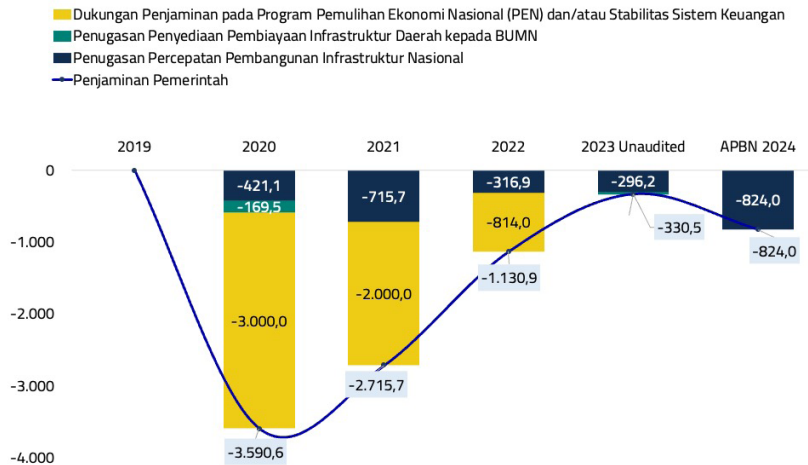
pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Pemberian pinjaman ini sapat berupa penerusan pinjaman luar negeri yang dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/Blue Book).

Penjaminan Pemerintah: Mengurangi Risiko dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah memberikan penjaminan. Penjaminan ini bertujuan mengurangi risiko bagi investor dan kreditur.

Program-program strategis nasional yang mendapatkan penjaminan meliputi percepatan pembangunan infrastruktur dan program non-infrastruktur. Dengan adanya penjaminan ini, risiko investasi bagi pihak swasta dan kreditur berkurang.

Gambar 6. Perkembangan Kewajiban Penjaminan, 2019 - 2024 (dalam Rp miliar)



Sumber: Kementerian Keuangan

Manfaat Penjaminan Pemerintah:

1. Mengurangi Risiko Investasi
2. Mendorong Partisipasi Swasta
3. Mempercepat Pembangunan.

- Trans Sumatera
- Penyelenggaraan LRT Jabodebek
- Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan

Mengoptimalkan Pembiayaan Lainnya: Menjaga Keberlanjutan Fiskal di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Pemerintah semakin mengoptimalkan penggunaan SAL ini untuk mengurangi jumlah utang negara dan menjaga stabilitas fiskal. Dalam menghadapi ancaman resesi global, pemerintah terus berupaya mengantisipasi dampak negatifnya terhadap perekonomian domestik. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memaksimalkan penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan non-utang dan alat untuk stabilisasi pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Untuk tahun 2025, pemerintah

mengembangkan strategi pengelolaan SAL yang mencakup tiga aspek utama: optimalisasi, efisiensi, dan fleksibilitas pemanfaatan SAL.

1. Optimalisasi SAL

Optimalisasi SAL dilakukan melalui pengelolaan kas untuk menghasilkan imbal hasil.

2. Efisiensi Penggunaan SAL

Efisiensi diwujudkan dengan menetapkan besaran SAL yang dikelola berdasarkan skenario terburuk dan pertimbangan risiko

3. Fleksibilitas Pemanfaatan SAL:

Penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan yang dianggarkan pada tahun sebelumnya tetapi belum direalisasikan dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Fleksibilitas ini memastikan bahwa dana yang tidak terpakai tetap bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak di masa depan.

Penjaminan Tahun 2024

Pada tahun 2024, penjaminan pemerintah akan dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih terukur dan hati-hati. Pemerintah akan fokus pada mitigasi risiko dan memastikan proyek-proyek strategis berjalan sesuai rencana. Beberapa program yang akan menjadi fokus antara lain:

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara
- Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- Penyediaan Air Minum
- Pembangunan Jalan Tol



Respons Fiskal pada Tujuan ‘Berkelanjutan’: Antara Pembangunan dan Pertumbuhan

Muhammad Rizky⁵ & Apri Prayoga Arrfah⁶

Desain arah kebijakan fiskal tahun depan telah dirumuskan melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025. Dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2025 tersebut mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Menjadi menarik karena tema yang diusung memberi penekanan pada

isu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, alih-alih ‘sekedar’ target pertumbuhan ekonomi tinggi.

Jika ditelisik lebih dalam, narasi yang digaungkan adalah bahwa arah kebijakan dalam dokumen tersebut pada dasarnya mencerminkan upaya-upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan serta pencapaian sasaran jangka menengah-panjang

dalam upaya akselerasi Visi Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, tahun 2025 menjadi tahun yang amat strategis sebagai pijakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Maka visi tersebut kemudian perlu didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan.

^{5,6}Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

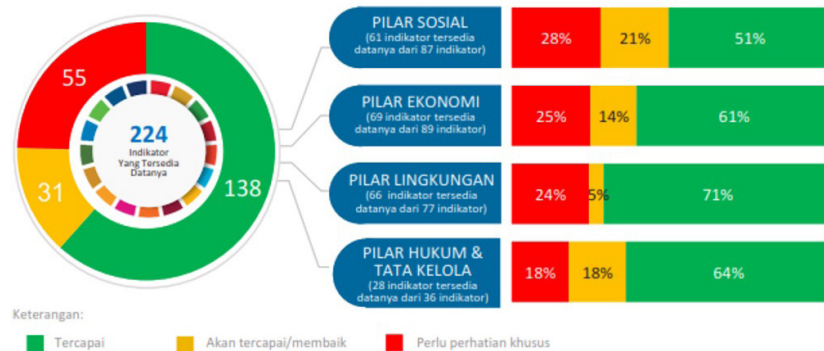
Namun demikian, *goals* yang menyisipkan narasi 'berkelanjutan' tak cukup berhenti pada isu pertumbuhan ekonomi. Sebab terdapat isu lain yang lebih multidimensi, bahkan menjadi 'janji' yang harus ditepati. Adalah isu pembangunan berkelanjutan yang merupakan amanat dari SDGs (*Sustainable Development Goals*); sebuah komitmen berskala global yang disepakati pada tahun 2015 dan ditargetkan tercapai pada 2030. Berisi 17 tujuan yang ditetapkan oleh PBB guna mencapai sasaran kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

Lalu, setelah separuh perjalanan agenda 2030, bagaimana pemenuhan capaian SDGs secara nasional dan global hingga saat ini? Bagaimana pula peran Pemerintah Indonesia dalam menyelaraskan isu keberlanjutan di dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-TPB) ke dalam instrumen fiskal di dalam APBN?

Milestones dan Capaian Terkini

Sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen terhadap pencapaian bersama SDGs dalam kancah global, Indonesia turut menorehkan capaian penting. Berdasarkan laporan terkini Pelaksanaan Pencapaian TPB 2023, Indonesia berhasil memperbaiki peringkat dari

posisi 102 (2022) ke posisi 75 (2023). Hasil ini didukung dengan tercapainya 138 dari 224 indikator target yang datanya tersedia, 31 indikator yang semakin membaik dan menuju tercapai, sehingga secara umum 76% dari indikator SDGs mengalami kemajuan. Kendati demikian, 55 indikator sisanya membutuhkan perhatian khusus atau berisiko tidak tercapai. Penjelasan capaian ini diringkas pada grafik berikut.



Sumber: Bappenas, 2023

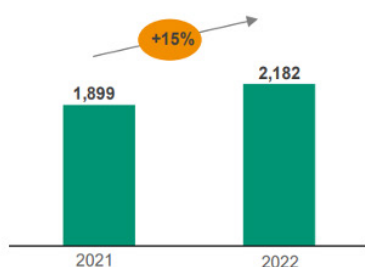
Capaian penting TPB yang dilaporkan pemerintah pada pilar sosial yaitu pengurangan beban pengeluaran sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat, perbaikan ketepatan sasaran program bantuan sosial, penguatan program di bidang pendidikan dan kesehatan, serta program dukungan kesetaraan gender. Adapun pada pilar ekonomi, pemerintah berfokus dalam pengembangan aktivitas perekonomian hijau, peningkatan nilai komoditas melalui industrialisasi dan hilirisasi, peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan UMKM, penurunan

tingkat pengangguran terbuka, serta penanggulangan tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.

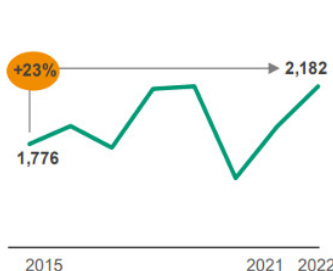
Pada pilar berikutnya yaitu lingkungan, terdapat *milestones* penting berupa pengendalian pencemaran limbah industri, peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan transportasi publik ramah lingkungan, penanganan

sampah, pembangunan rendah karbon, pelaksanaan sistem ketahanan bencana, konservasi biologis perairan dan kehutanan, serta pemeliharaan sektor kehutanan. Pilar terakhir yaitu hukum dan tata kelola, progres utama yang diungkapkan antara lain reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, pemerintahan yang transparan, pemenuhan hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum.

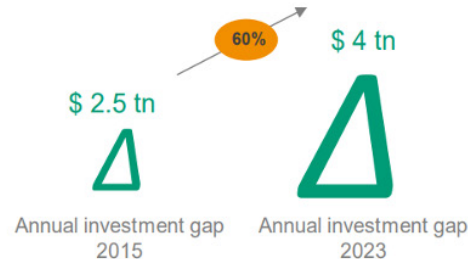
International investment project numbers in SDG sectors were up in 2022...



...but growth since the adoption of the SDGs has been insufficient



As a result, at the midpoint of the 2030 agenda, the SDG investment gap has widened



Sumber: UNCTAD, 2023

Tantangan Kemajuan dan Respons Kebijakan Pemerintah

Sepuluh perjalanan menuju *deadline* tahun 2030, capaian SDGs global di tahun 2023 menunjukkan progress yang tidak cukup menggembirakan. Dalam Laporan SDGs 2023 yang diterbitkan PBB, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres membuka laporan tersebut dengan narasi yang penuh keprihatinan. "Kemajuan pada lebih dari 50 persen target masih lemah dan tidak memadai, bahkan 30 persen lainnya terhenti atau mengalami kemunduran. Pandemi COVID-19 dan tiga krisis sekaligus yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi memberikan dampak yang sangat besar dan berkelanjutan." katanya.

Isu pembiayaan juga menjadi tantangan lain yang cukup serius. UNDP (*United Nations Development Programme*) menyebutkan bahwa butuh lebih dari USD4 triliun untuk menutup kesenjangan

pembiayaan global agenda SDGs. Sementara, tinjauan UNCTAD (*UN Trade and Development*) menunjukkan bahwa jumlah proyek investasi SDGs internasional di negara berkembang meningkat 15% pada tahun 2022. Namun, pertumbuhannya tidak seimbang, dengan beberapa sektor SDGs hanya menunjukkan kemajuan yang lambat. Pertumbuhan tersebut juga tidak merata, dengan tren negatif di *least developed countries* dan stagnasi di banyak negara berkembang lainnya. Sebagai hasilnya, kesenjangan investasi SDGs tahunan di negara-negara berkembang melebar dari USD2,5 triliun menjadi sekitar USD4 triliun.

Di Indonesia sendiri, kompleksitas dimensi agenda TPB juga menjadikan upaya pencapaiannya membutuhkan dukungan biaya yang sangat besar. Bappenas menyebutkan bahwa kebutuhan pendanaan untuk pencapaian SDGs Indonesia sampai tahun 2030 sebesar Rp67.000 triliun dengan kesenjangan (*gap*) pembiayaan mencapai

Rp14.000 triliun. Namun, setelah pandemi Covid-19 total kebutuhannya meningkat menjadi Rp122.000 triliun dan *gap* meningkat hingga Rp24.000 triliun.

Untuk mendukung hal tersebut, intervensi fiskal menjadi salah satu *resource* penting yang perlu dioptimalisasi. Tak heran jika instansi pengelola fiskal, Kementerian Keuangan ditunjuk sebagai bagian instansi-instansi pelaksana di seluruh 17 agenda SDGs Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Regulasi ini menyebutkan pula kebijakan perencanaan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan dimaksud dapat bersumber dari APBN/D dan/atau pendanaan inovatif termasuk bentuk bauran pendanaan (*blended finance*).

Berbagai peluang pendanaan yang berfokus untuk

mengoptimalkan pencapaian SDGs nasional telah diinisiasi oleh pemerintah. Peluang tersebut pernah diupayakan melalui penerbitan SDGs Bonds pada akhir tahun 2021 senilai EUR500 juta atau setara Rp8,8 triliun. Pemerintah juga memiliki platform *blended finance SDGs Indonesia One (SIO)* yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan saat ini telah memperoleh komitmen sebesar Rp63,4 triliun. Di samping itu, bantuan internasional turut mengalir dari berbagai lembaga, seperti UNICEF, ADB, JICA, GIZ, UNDP, dan DFAT berupa dukungan terhadap pembentukan *dashboard*, pembuatan peta jalan SDGs, pengembangan infrastruktur e-Monev, dan dukungan kesekretariatan SDGs.

Strategi Akselerasi Pencapaian TPB

Pertama, sasaran pembangunan berkelanjutan perlu terus menjadi prioritas utama di dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional setiap tahun anggaran. Sejauh ini, kebijakan pembangunan tahun 2025 diprioritaskan pada bidang sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi inklusif berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejatinya telah selaras terhadap sasaran SDGs, sehingga komitmen pemerintah perlu didorong agar konsisten dalam mengharmonisasikan pembangunan nasional

dengan sasaran SDGs yang hendak dicapai.

Indonesia telah mengimplementasikan pula penandaan anggaran (*budget tagging*) guna mengidentifikasi penanganan isu-isu tertentu di dalam APBN. Penandaan anggaran secara reguler telah dilakukan untuk tema-tema yang berkaitan dengan isu SDGs, seperti infrastruktur, responsif gender, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan stunting. Penandaan ini diharapkan mampu menjamin akuntabilitas, memudahkan pengawasan, dan memusatkan pengerahan sumber daya. Untuk itu, *budget tagging* membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh instansi/lembaga yang bertanggung jawab. Selain itu, perbaikan relevansi rincian luaran menjadi krusial untuk mendukung penganggaran yang ekonomis, efektif, dan efisien.

Kedua, perbaikan fokus kualitas belanja penting dilakukan tidak hanya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memenuhi indikator SDGs secara kontinu. Peran pemerintah semakin strategis karena komitmen terhadap SDGs harus dibuktikan melalui alokasi belanja negara yang mampu memberikan stimulus kepada aktivitas perekonomian secara luas. Sasaran kebijakan fiskal jangka pendek tahun 2025 telah dirumuskan dengan mengutamakan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-*

being masyarakat, dan konvergensi kewilayahan antardaerah. Seiring dengan sasaran tersebut, optimalisasi belanja harus secara simultan mengarah kepada seluruh pilar SDGs yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola.

Ketiga, pemerintah dapat mengambil kesempatan melalui penguatan diplomasi dan kerja sama internasional seiring dengan membaiknya rezim multilateralisme global. Proposal pendanaan perlu untuk terus diupayakan sebagai bentuk dukungan nyata negara-negara maju terhadap pencapaian SDGs pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pendanaan ini dapat dialirkan secara inovatif melalui *existing channels* seperti SBN proyek terkait SDGs, hibah, filantropi, maupun platform SIO. Sebelumnya, tantangan yang mengemuka bagi pencapaian SDGs adalah berkembangnya *inward looking* yang lebih mengutamakan kepentingan unilateral daripada global. Beruntung, *Action Plan to Accelerate SDGs* yang dicapai pada forum G20 tahun 2023 di India berhasil membuktikan kembalinya kesepahaman global akan pencapaian sasaran bersama.

Keempat, pemahaman SDGs yang masih terbatas di berbagai lapisan masyarakat dan pihak privat turut menjadi kendala bagi pemerintah. Padahal, kesuksesan target SDGs memerlukan kesadaran dan partisipasi bersama secara *multistakeholders*.

Pemerintah lalu memiliki urgensi untuk meningkatkan inklusivitas dalam bentuk sosialisasi, *focused group discussion* (FGD), dan bimbingan teknis seputar SDGs. Kebijakan ini dapat digabungkan pula dengan *embedded action program* guna mengaktualisasikan secara nyata hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan.

Strategi terakhir akselerasi pencapaian SDGs di Indonesia dapat lebih mengoptimalkan peran lembaga eksaminatif seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pelibatan peran kelembagaan ini diharapkan dapat menyelaraskan pembangunan nasional dengan agenda SDGs. Saat ini, BPK telah rutin dilibatkan untuk menilai relevansi data dan informasi dalam pelaporan SDGs pemerintah. Tidak cukup sampai di sana, peninjauan

terhadap kualitas anggaran dan belanja mengenai SDGs dapat terus dikawal dengan baik. Peninjauan ini dibutuhkan guna memastikan ketepatan *output* dan *outcome* serta memenuhi prinsip akuntabilitas kepada publik.

vSebagaimana telah tertulis di dalam tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; SDGs telah menjadi agenda global yang dapat dilaksanakan secara linier. Prinsip *no one left behind* yang diusung oleh SDGs telah mengingatkan kita untuk terus bahu-membahu mencapai kesejahteraan (*well-being*) secara universal. Peran pemerintah melalui berbagai intervensi fiskal tak ubahnya menjadi garda terdepan dalam mengakselerasi pertumbuhan tanpa melupakan aspek berkelanjutan.



Kinerja Sektor Keuangan Indonesia: Menghadapi Tantangan dan Peluang

Wignyo Parasian⁷

Sebagai salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, Indonesia terus dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan di sektor keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan secara kontinu mengalami perubahan yang signifikan, baik dari sisi pertumbuhan maupun regulasinya. Berkaca pada pasar global yang bergerak secara dinamis serta cepatnya perubahan teknologi, lanskap sektor keuangan Indonesia pun menjadi semakin rumit dengan tingkat risiko yang kompleks. Adaptasi dan respons terhadap perubahan akan menjadi kunci bagi sektor ini untuk memastikan stabilitas serta pertumbuhan yang berkelanjutan.

Situasi perekonomian global

yang penuh ketidakpastian memberikan dampak signifikan terhadap sektor keuangan Indonesia. Tingkat inflasi yang masih cukup tinggi di Amerika Serikat (AS) mendorong kebijakan moneter AS untuk mempertahankan suku bunga acuannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat arus modal yang masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, *yield* surat utang AS yang mengalami kenaikan turut menarik investor global untuk berpindah ke aset berdenominasi Dollar. Alhasil, nilai tukar pada hampir di seluruh negara *emerging markets*, termasuk Indonesia, tercatat mengalami depresiasi (pelemahan) cukup dalam pada awal April 2024 lalu seiring menguatnya mata uang Dollar AS. Dengan belum tercapainya ekspektasi

pemulihan ekonomi Tiongkok, yang merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, ketidakpastian pada perekonomian dunia pun tereskalasi dan dapat mengganggu stabilitas perekonomian serta sistem keuangan Indonesia.

Sektor keuangan sendiri memiliki peran yang begitu strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia. Pertama, akses pendanaan yang diberikan oleh perbankan maupun lembaga keuangan bagi perusahaan serta individu. Fasilitas ini secara langsung memperkuat perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi, investasi, dan pertumbuhan bisnis. Kedua, peran intermediasi keuangan yang dilakukan bank guna menjembatani

⁷Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

pihak depositor dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Kegiatan ini dapat mendukung aliran dana dalam perekonomian, sehingga tingkat likuiditas tetap terjaga. Kondisi sektor keuangan yang sehat akan mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi. Dengan regulasi serta pengawasan yang baik, sistem keuangan pun dapat terhindar dari potensi krisis.

Kondisi sektor keuangan tanah air relatif cukup solid hingga triwulan I tahun 2024. Salah satu indikator yang dapat digunakan yakni Dana Pihak Ketiga (DPK). Pertumbuhan DPK memiliki peran signifikan pada sektor keuangan karena berdampak besar pada likuiditas perbankan serta ketersediaan dana untuk pembiayaan. Selama empat bulan pertama pada 2024, DPK perbankan secara kontinu mencatatkan pertumbuhan di atas lima persen setelah pada triwulan IV 2023 hanya berada di level tiga persen. Terdapat dua faktor utama pendorong pertumbuhan DPK perbankan, yakni pertumbuhan jenis rekening giro dan berlanjutnya peningkatan DPK korporasi seiring dengan aktivitas bisnis yang mengalami ekspansi. Meski demikian, pertumbuhan DPK perseorangan relatif rendah, dimana pada April 2024 hanya tumbuh 2,3 persen (yoy). Terdapat indikasi bahwa individu saat ini cenderung melakukan konsumsi ataupun memilih investasi lain dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal tersebut menjadi tantangan bagi perbankan

untuk menyesuaikan suku bunga deposito guna menarik simpanan dari nasabah. Dengan demikian, memahami tren maupun perilaku nasabah menjadi kunci dalam mengelola pertumbuhan DPK yang berkelanjutan.

Kinerja kredit pada sektor perbankan juga menjadi sorotan penting dalam mengukur stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi. Sejak Desember 2023, sektor perbankan tercatat tumbuh di atas sepuluh persen yang didorong tingginya pertumbuhan pada kredit investasi serta kredit modal kerja. Sejalan dengan tren DPK, pertumbuhan kredit juga ditopang oleh korporasi yang mencapai 17,0 persen (yoy) pada April 2024 seiring dengan kebutuhan modal kerja untuk kegiatan operasional bisnis. Lebih lanjut, pertumbuhan kredit yang menggembirakan ini didukung oleh risiko kredit yang terkelola dengan baik. *Non-Performing Loan (NPL)*

stabil di level 2,0 persen sejak Juni 2022, menunjukkan kredit hampir macet dan macet relatif rendah. Hal ini menjadi peluang bagi sektor perbankan untuk terus mengakselerasi kredit kepada masyarakat maupun bisnis.

Teknologi dan inovasi akan memainkan peran krusial bagi sektor keuangan Indonesia dalam memanfaatkan peluang yang ada di masa mendatang. Tren dan peran teknologi terhadap sektor keuangan terlihat dari besarnya nilai transaksi pembayaran digital Indonesia. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi *digital banking* mencapai Rp5.341 triliun atau tumbuh sebesar 19,08 persen (yoy) pada April 2024. Hal ini juga diikuti transaksi uang elektronik yang tumbuh 33,99 persen (yoy) serta pertumbuhan transaksi QRIS yang mencapai 194,06 persen (yoy) pada periode yang sama. Ke depannya, kontribusi teknologi finansial (*fintech*) serta layanan pembayaran

Gambar 1. Perkembangan DPK dan Kredit Indonesia (yoy)



Sumber: Bank Indonesia

digital akan terus menguat seiring transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Terlebih, dengan adanya investasi besar dalam konektivitas 5G serta *Internet of Things* (IoT), layanan keuangan digital menjadi lebih canggih, sehingga dapat mendorong peningkatan jumlah aplikasi *fintech* di Indonesia. Platform ini memungkinkan masyarakat serta bisnis untuk memiliki akses kepada layanan pinjaman serta pembayaran yang mudah dan cepat.

Tantangan utama bagi Indonesia dalam mendorong layanan keuangan digital adalah masih kurangnya pendalaman pasar keuangan. Pertama, kapitalisasi pasar modal Indonesia relatif rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. World Bank mencatat bahwa Indonesia memiliki kapitalisasi pasar modal sebesar 46,3 persen pada 2022, sedangkan Filipina telah mencapai 59,0 persen, Malaysia sebesar 93,7 persen, serta Thailand yang tercatat mencapai 122,0 persen. Rendahnya kapitalisasi pasar modal akan berpengaruh terhadap keterbatasan perusahaan serta masyarakat dalam mengakses sumber pendanaan yang lebih luas. Kedua, adanya keterbatasan pada variasi produk maupun instrumen keuangan. Diversifikasi pada produk keuangan dapat memberikan alternatif investasi kepada masyarakat maupun korporasi sehingga dapat meningkatkan daya tarik pasar. Terakhir, belum matangnya infrastruktur

pasar keuangan yang mengakibatkan efisiensi serta likuiditas pasar terbatas.

Kebijakan moneter memainkan peran penting untuk menjamin stabilitas sektor keuangan Indonesia. Suku bunga acuan saat ini berada di level 6,25 setelah naik kembali 25 bps pada April 2024 lalu untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta memastikan inflasi terkendali. Sementara itu, Bank Indonesia masih melanjutkan operasi pasar terbuka yang bersifat kontraktif melalui penyerapan uang beredar dengan membeli surat berharga pemerintah. Kebijakan ini kemungkinan akan berlanjut dalam jangka pendek mengingat situasi global yang penuh ketidakpastian, terutama akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Namun, untuk mendorong sektor keuangannya, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melonggarkan kedua kebijakan ini melalui penurunan suku bunga dan operasi moneter ekspansif untuk mengakselerasi likuiditas, permintaan kredit, serta biaya pinjaman.

Peran krusial juga dipegang kebijakan fiskal untuk membantu sektor keuangan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Kementerian Keuangan sebagai pengelola anggaran pemerintah harus memastikan kebijakan anggaran yang seimbang dan berkelanjutan karena dapat memengaruhi likuiditas serta permintaan kredit. Dalam situasi

perekonomian global yang tidak pasti, Kementerian Keuangan dapat mengambil langkah stimulus, misalnya melalui pemberian insentif pajak atau peningkatan belanja publik. Harapannya yakni agar dapat merangsang pertumbuhan serta memperkuat sektor keuangan. Namun, untuk memastikan kedua kebijakan ini saling mendukung, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus saling bersinergi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Sektor keuangan Indonesia perlu untuk terus berinovasi dan beradaptasi menghadapi peluang serta tantangan yang ada. Teknologi tentunya harus dimanfaatkan guna memperkuat daya saing sektor keuangan. Selain itu, bauran kebijakan fiskal dan moneter harus mampu bersinergi guna menghadapi perubahan lanskap ekonomi nasional maupun global. Namun, aspek inklusi keuangan perlu untuk diakselerasi mengingat indikator sistem keuangan Indonesia masih cukup tertinggal dibandingkan negara tetangga lainnya. Tantangan ini perlu diantisipasi agar sektor keuangan dapat memiliki peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.



Menimbang Pemanfaatan Insentif Perpajakan

Satya Tamyawan⁸, Yanuar Widiyanto⁹, & Anggi Aprilia¹⁰

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan suatu kawasan ekonomi dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, KEK memiliki tujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi

pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kegiatan usaha di KEK dapat berupa produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, riset, pariwisata, pengembangan energi, pendidikan, kesehatan, olahraga, jasa keuangan, industri kreatif, dan sebagainya.

UU Nomor 39 Tahun 2009 kemudian diterjemahkan ke dalam dua Peraturan Pemerintah (PP) turunannya yang mengatur penyelenggaraan, dan PP

yang mengatur insentif perpajakan. PP yang mengatur penyelenggaraan KEK tersebut, yaitu PP Nomor 2 Tahun 2011 jo. PP Nomor 100 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, yang kemudian digantikan dengan PP Nomor 1 Tahun 2020. Di sisi lain, PP yang mengatur insentif perpajakan yaitu PP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam rangka simplifikasi, kedua kelompok PP yang mengatur penyelenggaraan dan fasilitas perpajakan

⁸Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

⁹Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

¹⁰Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, yang mengatur penyelenggaraan dan pemberian insentif perpajakan KEK.

Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan, baik berupa fasilitas perpajakan maupun non perpajakan, dalam rangka menarik investasi di KEK. Fasilitas perpajakan KEK telah diberikan sejak tahun 2015 melalui PP Nomor 96 Tahun 2015. Selama perkembangannya, peraturan tersebut mengalami penggantian dengan PP Nomor 12 Tahun 2020 dan PP Nomor 40 Tahun 2021. Fasilitas perpajakan untuk KEK merupakan yang paling *ultimate* dibandingkan semua fasilitas perpajakan untuk

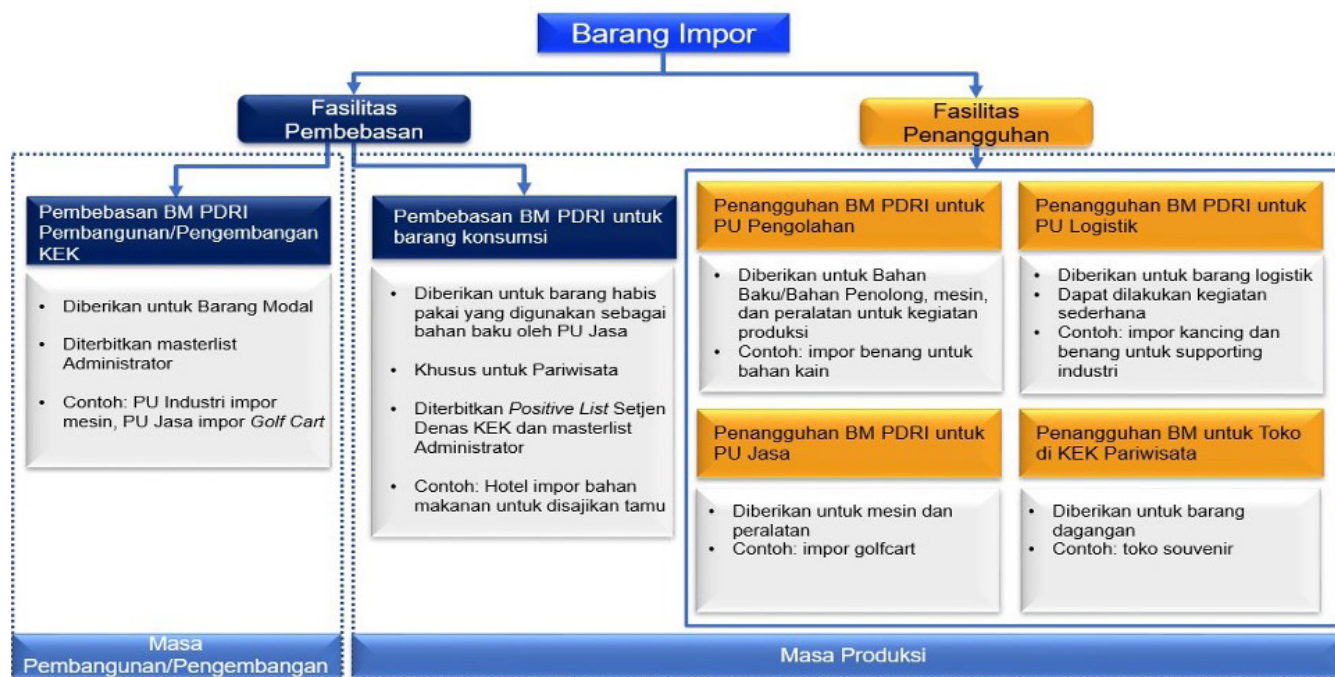
kawasan yang lain. Fasilitas-fasilitas perpajakan untuk KEK, yaitu *tax holiday* KEK dan *tax allowance* KEK; bea masuk dan PPN dibebaskan untuk barang modal; bea masuk tidak dipungut untuk bahan baku, cukai dibebaskan untuk bahan baku, dan PPN tidak dipungut untuk bahan baku. Selain itu, khusus untuk KEK Pariwisata terdapat tambahan insentif PPnBM tidak dikenakan untuk hunian mewah, dan bea masuk dibebaskan serta PPN tidak dipungut untuk barang konsumsi.

Dalam melaksanakan kebijakan pemberian insentif perpajakan di KEK, Pemerintah juga telah menetapkan PMK 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Setelah berlakunya PP 12 Tahun 2020 yang diikuti PP 40 Tahun 2021, PMK tersebut kemudian digantikan dengan PMK 237/PMK.010/2020 jo. PMK 33/PMK.010/2021 untuk menyesuaikan kebijakan yang diatur dalam PP.

Sampai tahun 2023 telah ditetapkan dua puluh KEK dengan kegiatan utama berupa industri, logistik, kesehatan, pengembangan teknologi, dan pariwisata. Dari dua puluh KEK yang telah ditetapkan, sembilan di antaranya merupakan KEK yang memiliki kegiatan utama pariwisata dan enam di antaranya telah beroperasi. Dalam kaitannya dengan fasilitas perpajakan untuk KEK, insentif perpajakan KEK Pariwisata lebih luas daripada KEK Industri.

Gambar 1. Jenis Insentif Kepabeanan di KEK



Perkembangan KEK Pariwisata di Indonesia

KEK Pariwisata merupakan KEK nonindustrial yang dibangun untuk tujuan peningkatan sektor pariwisata di Indonesia. Saat ini terdapat sembilan KEK pariwisata yang telah ditetapkan pemerintah, namun baru enam yang telah beroperasi. KEK Tanjung Lesung merupakan KEK Pariwisata yang pertama kali beroperasi, yaitu pada tahun 2015, kemudian disusul Mandalika pada tahun 2017, dan Tanjung Kelayang pada tahun 2019. Sementara tiga KEK lainnya, yaitu Singhasari, Nongsa, dan Lido baru beroperasi di tahun 2022.

Insentif perpajakan yang diberikan di KEK pariwisata lebih spesial daripada yang

diberikan di KEK industri. Perbedaan tersebut terdapat pada insentif PPnBM untuk hunian mewah, dan pembebasan bea masuk serta tidak dipungut PDRI untuk barang konsumsi. Dari keenam KEK pariwisata yang telah beroperasi, baru empat di antaranya yang memanfaatkan insentif perpajakan KEK. Insentif *tax holiday* KEK baru dimanfaatkan oleh KEK Singhasari dan Nongsa, sementara untuk insentif kepabeanan dan PDRI baru dimanfaatkan oleh KEK Mandalika dan Lido.

Berdasarkan data Sekretaris Dewan Nasional KEK pada tahun 2023, capaian investasi terbesar dihasilkan di KEK Mandalika sebesar Rp5 triliun atau 29,6% dari keseluruhan investasi KEK Pariwisata.

Sementara itu, KEK Tanjung Lesung mencatatkan penyerapan tenaga kerja dan jumlah pelaku usaha terbanyak dengan 2.930 tenaga kerja dan 22 pelaku usaha. Data lebih menarik terlihat pada KEK Nongsa yang baru beroperasi di tahun 2022, tetapi dapat menarik 17 pelaku usaha dengan 2.618 tenaga kerja.

Pemanfaatan Insentif Perpajakan di KEK Pariwisata

Realisasi insentif PPh di KEK Pariwisata masih sangat minim. Hingga saat ini baru terdapat dua perusahaan yang telah mengajukan insentif *tax holiday* KEK. Bahkan satu di antaranya baru di tahap persetujuan, sementara satu perusahaan yang lainnya telah

Tabel 1. Investasi di KEK Pariwisata

No	KEK	Keg Utama	PP Penetapan	Mulai Beroperasi	Okupansi Lahan	Capaian Investasi	Jumlah Pelaku usaha	Tenaga Kerja
1	Tanjung Lesung	Pariwisata	PP 26 2012	Februari 2015	1.500Ha (95,33%)	Rp2,1T	22	2.930
2	Mandalika	Pariwisata	PP 52 2014	Oktober 2017	1.035,67Ha (100%)	Rp5T	12	1.141
3	Tanjung Kelayang	Pariwisata	PP 6 2016	Maret 2019	324,4Ha (100%)	Rp1,7T	7	598
4	Singhasari	Pariwisata IT	PP 68 2019	November 2022	120,3Ha (78,6%)	Rp440M	3	470
5	Likupang	Pariwisata	PP 84 2019	-	197,4Ha (100%)	Rp372M	3	313
6	Lido	Pariwisata	PP 69 2021	November 2022	1.040Ha (83,13%)	Rp3,44T	4	1.690
7	Nongsa	IT Pariwisata	PP 68 2021	November 2022	166,45Ha (100%)	Rp2,4T	17	2.618
8	Sanur	Pariwisata Kesehatan	PP 41 2022	-	41,26Ha (100%)	Rp1,44T	2	1.622
9	Kura-kura	Pariwisata	PP 232023	-	498Ha (100%)	-	-	-

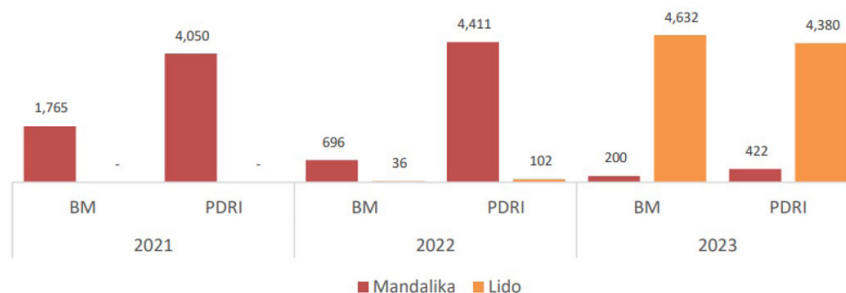
Sumber: Sekdenas KEK (2023), diolah

disetujui dan diberikan insentif *tax holiday* KEK selama 10 tahun.

Sama halnya untuk insentif kepabeanan, berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemanfaatan insentif kepabeanan di KEK Pariwisata juga minim. Sampai dengan tahun 2023, dari sembilan KEK Pariwisata yang telah ditetapkan baru dua KEK Pariwisata yang merealisasikan insentif pembebasan bea masuk dan PDRI. Pada Gambar 2 dapat dilihat baru KEK Mandalika dan KEK Lido yang memanfaatkan insentif pembebasan bea masuk dan PDRI untuk barang modal. Insentif tersebut dimanfaatkan pengusaha pada tahap pembangunan KEK. Pada tahun 2022, KEK Mandalika merealisasikan insentif pembebasan bea masuk sebesar Rp696 juta dan pembebasan PDRI sebesar Rp4,4 miliar. Untuk tahun 2023, realisasi insentif pembebasan bea masuk dan PDRI tercatat masih rendah. Di sisi lain, untuk KEK Lido, pada tahun 2023 tercatat realisasi pembebasan bea masuk sebesar Rp4,6 miliar dan pembebasan PDRI sebesar Rp4,4 miliar.

KEK Mandalika juga merealisasi insentif pembebasan BM dan PDRI untuk barang konsumsi pada acara Moto GP di KEK Mandalika tahun 2021 untuk Bea Masuk dan PDRI masing-masing sebesar Rp368 ribu dan Rp156 juta. Untuk tahun

Gambar 2. Pemanfaatan Insentif Pembebasan BM dan PDRI di KEK Pariwisata (Juta Rp)



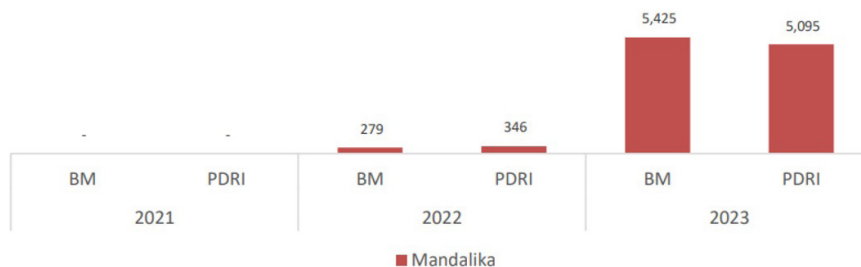
Sumber: DJBC

2022, terdapat realisasi insentif Bea Masuk sebesar Rp3,5 juta dan PDRI sebesar Rp113 juta.

Untuk insentif penangguhan bea masuk dan PDRI, baru terdapat satu KEK yang memanfaatkan, yaitu

sebesar Rp279 juta dan untuk PDRI sebesar Rp346 juta. Di sisi lain, pada tahun 2023 pemanfaatan insentif penangguhan bea masuk sebesar Rp5,4 miliar dan untuk PDRI sebesar Rp5,1 miliar.

Gambar 3. Pemanfaatan Insentif Penangguhan BM dan PDRI di KEK Pariwisata (Juta Rp)



Sumber: DJBC

KEK Mandalika. Insentif penangguhan bea masuk dan PDRI untuk kegiatan pariwisata dapat berupa untuk pengadaan mesin peralatan jasa, alat transportasi, maupun barang dagangan/souvenir untuk dijual di toko KEK Pariwisata. Pemanfaatan insentif penangguhan bea masuk di KEK Mandalika pada tahun 2022 baru

Korelasi Pemanfaatan Insentif Perpajakan dengan Perkembangan KEK Pariwisata

KEK Nongsa menjadi satu-satunya KEK yang telah memanfaatkan insentif PPh. Hanya dengan waktu kurang lebih satu tahun, KEK Nongsa telah mencatatkan capaian investasi sebesar Rp2,4 triliun yang merupakan terbesar ketiga dari sembilan KEK

Pariwisata yang lain. KEK Nongsa juga mencatatkan angka penyerapan tenaga kerja dan pelaku usaha terbesar kedua setelah KEK Tanjung Lesung.

KEK Mandalika menjadi KEK yang memanfaatkan insentif kepabeanan terbesar di antara KEK yang lain. Dengan didukung insentif kepabeanan, KEK Mandalika mencatatkan capaian investasi terbesar dan jumlah pelaku usaha terbesar kedua. Menurut penelitian Syafruddin, dkk (2020) KEK Mandalika telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat. Capaian tenaga kerja sebesar 1.141 orang di KEK Mandalika menjadi pertanda bahwa terjadi perubahan mobilitas pekerjaan yang signifikan.

KEK Lido pada tahun 2023 juga mencatatkan pemanfaatan insentif pembebasan bea masuk dan PDRI untuk barang modal terbesar. Insentif tersebut dimanfaatkan pada tahap pembangunan KEK dikarenakan KEK Lido baru beroperasi pada November 2022. Hal ini sejalan dengan capaian investasi KEK Lido yang cukup besar, yaitu Rp3,44 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.690 orang.

Penyerapan tenaga kerja dan jumlah pelaku usaha di KEK Tanjung Lesung cukup besar walaupun belum memanfaatkan fasilitas perpajakan KEK. Hal ini dapat dijelaskan bahwa fasilitas

perpajakan bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menarik investasi di KEK. Mulyawati, dkk (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan memasukkan partisipasi masyarakat dalam skenario pengembangan KEK akan dapat meningkatkan keberlanjutan pariwisata di KEK Tanjung Lesung yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan, faktor lingkungan, dan daya tarik pariwisata.

Faktor infrastruktur juga menjadi hal yang penting dalam pengembangan KEK. Menurut Nel & Rogerson (2013) kesuksesan KEK juga tergantung karakteristik daerah, dan mayoritas KEK dibentuk di daerah dekat akses transportasi daripada di daerah pedalaman KEK Mandalika dan KEK Tanjung Lesung yang dekat dengan bandara internasional dan pelabuhan menjadikannya salah satu pilihan utama bagi wisatawan yang datang di Lombok dan Jakarta. Sementara itu, kurangnya fasilitas penerbangan langsung dari luar negeri ke KEK Likupang dianggap menjadi salah satu alasan lambatnya realisasi investasi dan berkurangnya pengunjung mancanegara (Warouw, dkk., 2023).

Fasilitas Perpajakan KEK masih minim

Pemanfaatan fasilitas perpajakan pada KEK Pariwisata dapat dikatakan masih minim pemanfaatannya.

Jenis fasilitas perpajakan KEK yang paling sering dimanfaatkan adalah insentif pembebasan bea masuk dan PDRI. Walaupun fasilitas perpajakan bukanlah satu-satunya faktor yang dapat menarik investasi di KEK, berdasarkan analisis data deskriptif disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara pemanfaatan insentif perpajakan di KEK Pariwisata dengan capaian investasi, serapan tenaga kerja, dan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mendorong pemanfaatan fasilitas perpajakan pada KEK Pariwisata guna meningkatkan dampak *multiplier* keberadaan KEK Pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat.

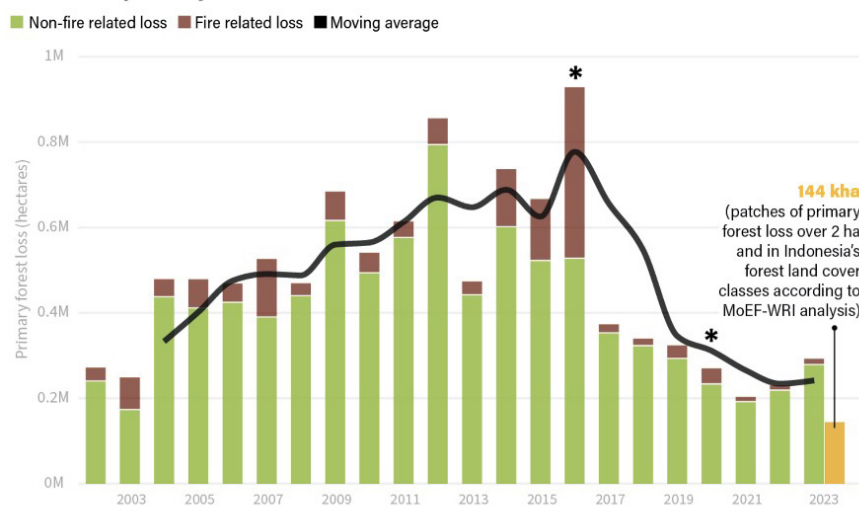


Pertanian sebagai Penyebab Sekaligus Korban Perubahan Iklim: Tinjauan Kebijakan Fiskal

Puput Waryanto¹¹ & Qadri Fidiemil Haq¹²

Pertanian memainkan peran yang kompleks dalam konteks perubahan iklim, karena selain bertindak sebagai penyebab, ia sekaligus korban dari fenomena ini. Di Indonesia, sektor pertanian menyumbang sekitar 7% dari total emisi gas rumah kaca (GRK) nasional (Mustikaningrum et al., 2021). Gas utama yang dihasilkan dari aktivitas pertanian meliputi karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitrogen oksida (N_2O). Deforestasi untuk membuka lahan pertanian merupakan sumber utama emisi CO_2 . Sesuai

Indonesia primary forest loss, 2002-2023



Sumber: World Resources Institute (2024)

¹¹Pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

¹²Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak

dengan angka deforestasi neto di dalam dan di luar kawasan hutan, Indonesia kehilangan sekitar 113.534,3 hektar hutan pada tahun 2020 s.d. 2021 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). World Resources Institute (2024) juga menunjukkan grafik peningkatan deforestasi sejak tahun 2021 meski sempat turun dari tahun 2016. Selain itu, proses pencernaan hewan ternak, terutama sapi, menghasilkan metana dalam jumlah signifikan sehingga menjadikan rantai pasokan ternak sebagai kontributor penting untuk perubahan iklim (Gerber et al., 2013).

Perubahan iklim membawa dampak besar pada sektor pertanian Indonesia melalui perubahan suhu, pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem. Kenaikan suhu global menyebabkan stres panas pada tanaman dan ternak serta mengurangi hasil produksi. Sebuah studi yang menggunakan model CERES-Rice dari *Decision Support System for Agrotechnology Transfer* (DSSAT) memprediksi bahwa perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu, dan radiasi matahari yang makin intensif di bawah perubahan iklim dapat mengurangi hasil padi di ketiga musim tanam pada Daerah Aliran Sungai Keduang, Kabupaten Wonogiri.

Perubahan pola curah hujan juga dapat menyebabkan banjir atau kekeringan. Frekuensi dan intensitas kekeringan meningkat di banyak bagian Indonesia, yang berdampak negatif pada

produksi pangan. Bencana alam seperti badai dan banjir yang semakin sering terjadi juga dapat menghancurkan tanaman dan infrastruktur pertanian. Beberapa data tersebut menunjukkan bahwa pertanian merupakan korban dari perubahan iklim.

Untuk memberikan *multiplier effect* yang lebih luas dalam mengurangi emisi dari sektor pertanian sekaligus mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, kebijakan fiskal memegang peranan yang penting. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat dapat memainkan peran kunci dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di sektor pertanian. Mitigasi mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk menurunkan emisi GRK guna mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Di sisi lain, adaptasi melibatkan langkah-langkah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, dengan tujuan meminimalkan dampak negatifnya.

Di Uni Eropa, *common agricultural policy* (CAP) memberikan pembayaran langsung kepada petani yang mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada tahun anggaran 2021, pembayaran langsung berjumlah EUR 37,9 miliar (68% dari seluruh pengeluaran CAP) dan memberikan manfaat kepada 6 juta pertanian di

seluruh Uni Eropa (European Commission, 2021). Selandia Baru mempertimbangkan untuk memasukkan sektor pertanian dalam skema perdagangan emisi nasional mereka. Sistem penetapan harga yang diusulkan didasarkan pada retribusi *split-gas* tingkat pertanian. Di India, program *Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana* (PMKSY) bertujuan meningkatkan efisiensi irigasi dan mengoptimalkan penggunaan air di India. Diluncurkan pada tahun 2015, program ini menggabungkan beberapa skema yang ada untuk memperluas area tanam yang dijamin irigasinya, mengurangi pemborosan air, dan memperbaiki efisiensi penggunaan air di lahan pertanian.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim. Salah satu kebijakan penting adalah pemberian subsidi pupuk organik mulai tahun 2024 untuk memastikan akses petani terhadap pupuk dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan. Pada tahun 2024, alokasi pupuk organik mencapai 500 ribu ton. Subsidi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian sambil mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, yang dapat menyebabkan emisi N_2O .

Pendanaan dalam rangka program pengendalian

perubahan iklim, juga telah diimplementasikan melalui *climate budget tagging* (CBT), yaitu pemberian tanda untuk mengidentifikasi output spesifik pada proses perencanaan dan anggaran yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dari proses CBT ini, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa porsi pendanaan publik untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim setara 14% dari total kebutuhan pendanaan mitigasi perubahan iklim berdasarkan *Third Biennial Update Report* (BUR-3) yang dipublikasikan oleh Kementerian LHK minimal 26% sampai dengan tahun 2030. Untuk menutupi *gap* pendanaan, penerbitan *green sukuk* telah dilakukan sejak tahun 2018. Selain kegiatan yang telah dananya dialokasikan melalui APBN, kegiatan juga dilakukan oleh aktor lain yang bekerja untuk isu perubahan iklim seperti lembaga *non-profit*, LSM, lembaga penelitian dan konsultasi. Pada umumnya, kegiatan bersifat *project-driven* dan biasanya berfokus pada isu spesifik seperti *land-use and land use change*, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, pendanaan iklim dan lainnya.

Dana penelitian juga telah dialokasikan dalam APBN melalui K/L terkait. Kementerian Pertanian telah berinvestasi dalam penelitian untuk mengembangkan varietas padi yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrem. Salah satu upaya

yang dilakukan adalah bekerja sama dengan *International Rice Research Institute* (IRRI) dalam sebuah rencana kerja lima tahun (2020-2024) yang mencakup pengembangan varietas padi yang tahan iklim dan bergizi tinggi. Selain itu, Badan Tenaga Nuklir Nasional Indonesia (BATAN) juga mengembangkan varietas padi baru menggunakan teknik iradiasi yang mampu bertahan terhadap perubahan cuaca ekstrem, seperti varietas Inpari Sidenuk yang menunjukkan hasil panen yang meningkat.

Untuk mendorong pihak swasta melakukan penelitian, pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Pemerintah memberikan pengurangan pajak bagi perusahaan yang menginvestasikan dana dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Insentif pajak yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% atau sering disebut *super tax deduction*.

Investasi dalam infrastruktur adaptasi juga sangat penting. Program seperti pengembangan sistem irigasi yang efisien dan pengelolaan air yang lebih baik telah diimplementasikan untuk membantu petani mengatasi variabilitas iklim. Misalnya, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan inisiatif penting yang

bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur irigasi di daerah pedesaan di Indonesia. Pada tahun 2020, program ini dilaksanakan di 10.000 lokasi yang tersebar di 33 provinsi. Dengan adanya irigasi yang baik, petani dapat lebih mengandalkan ketersediaan air untuk pertanian, mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan.

Kebijakan fiskal diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mitigasi emisi dan mendukung adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim. Melalui program asuransi pertanian, subsidi, investasi dalam R&D, insentif pajak dan pendanaan infrastruktur, pemerintah dapat membantu menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim. Upaya kolaboratif antara pemerintah, petani, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan iklim yang terus berkembang.

Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antar-lembaga. Banyaknya kementerian dan lembaga yang terlibat dalam sektor pertanian, seperti Kementerian Pertanian, KLHK, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan, sering kali menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan kurangnya sinergi dalam pelaksanaan program. Tantangan lainnya adalah kurangnya kapasitas dan

pengetahuan di tingkat petani mengenai praktik pertanian berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah memberikan insentif, banyak petani yang masih menggunakan metode tradisional yang kurang ramah lingkungan. Selain itu, pengawasan dan penegakan kebijakan juga menjadi isu penting.

Langkah-Langkah Ke Depan

Solusi pertama untuk mengatasi masalah pertanian sebagai penyebab sekaligus korban perubahan iklim adalah pengembangan kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan subsidi kepada petani yang menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, sistem irigasi hemat air, permakultur, dan metode rotasi tanaman yang baik. Terdapat 3 skema yang dapat diterapkan: (1) Pemberian dana tunai langsung kepada petani yang menerapkan pertanian berkelanjutan seperti pada program CAP di Uni Eropa; (2) Peningkatan subsidi pupuk organik yang lebih ramah lingkungan; atau (3) Penerapan pajak karbon bagi petani yang melebihi batas minimal emisi per hektarnya. Kebijakan seperti insentif pajak yang lebih luas pada sektor pertanian dapat mendorong kegiatan pertanian yang ramah lingkungan.

Kedua, investasi dalam teknologi dan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan juga sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Selain itu, penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrim harus terus didorong melalui kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Ketiga, peningkatan kapasitas dan edukasi petani juga diperlukan. Petani seringkali kurang memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, program pelatihan dan penyuluhan yang intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka mengenai teknik-teknik pertanian yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Pembinaan dapat berfungsi sekaligus sebagai pengawasan terhadap petani yang menerima program kebijakan fiskal ini. Pemerintah, melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah, dapat menyelenggarakan program pendidikan yang berkelanjutan untuk petani. Langkah ini akan memastikan bahwa petani memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan praktik pertanian yang mengurangi emisi dan

meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Penutup

Pertanian berada di garis depan dalam menghadapi perubahan iklim, baik sebagai kontributor utama emisi gas rumah kaca maupun sebagai sektor yang sangat rentan terhadap dampaknya. Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mengurangi emisi dari sektor pertanian dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Di Indonesia, berbagai kebijakan fiskal telah diterapkan, seperti asuransi pertanian, subsidi, investasi dalam R&D, insentif pajak dan pendanaan infrastruktur. Langkah-langkah ke depan harus mencakup pengembangan kebijakan insentif pajak dan subsidi yang mendukung pertanian berkelanjutan, investasi dalam teknologi dan infrastruktur pertanian, dan peningkatan kapasitas dan edukasi pertanian berkelanjutan kepada petani. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, kebijakan fiskal dapat membantu menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim, memastikan ketahanan pangan nasional, dan melindungi mata pencaharian jutaan petani di Indonesia.



Dari Jalanan Jakarta, Menuju Jantung Keuangan Dunia

Rosyid Bagus Ginanjar¹³

Suara riuh pegawai memenuhi aula RM. Notohamiprodjo saat digelarnya *Townhall Meeting* 2024 beberapa waktu lalu. Salah satu peserta membawa tulisan unik yang berbunyi, “*Hari Apa yang Ditunggu-Tunggu? Haryadi!*” Yel-yel dan nyanyian penyemangat bersahutan dari para pendukung masing-masing kandidat pegawai inspiratif.

Panggung sederhana di aula yang bertema persiapan menuju Ibu Kota Negara Nusantara itu menyimpan banyak kenangan bagi Haryadi, yang kini menjabat

sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya di Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sejak November 2019. Di panggung itulah, Haryadi dinobatkan sebagai Analis Kebijakan Madya Inspiratif 2024 saat perayaan ulang tahun BKF yang ke-18 di Jakarta.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk pimpinan saya di BKF dan rekan kerja yang telah ikhlas membantu dengan penuh tanggung jawab,” ungkap Ketua Bintal Islam BKF tersebut sambil tersenyum.

Penobatan Haryadi sebagai pegawai inspiratif 2024 tidak akan terwujud tanpa dukungan dari kolega dan berbagai pihak. Hal yang sama juga berlaku untuk capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, di mana setiap keberhasilan tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama rekan kerja serta pimpinan.

Pernah Jadi “Pengurus” Metro Mini

Haryadi kecil pernah membantu ayahnya mengurus usaha angkutan umum Metro Mini, bus berwarna

¹³Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

khas oranye-biru yang pernah populer dan merajai jalanan Jakarta sebelum Transjakarta hadir. Meskipun tidak diizinkan oleh ayahnya untuk mengemudikan bus, sebagai anak sulung dari lima bersaudara, Haryadi diberi tanggung jawab untuk membantu usahanya. Ia bertugas menyetorkan uang *management fee* ke kantor Metro Mini, membeli suku cadang di pusat onderdil Asam Reges, dan mengantar suku cadang yang rusak untuk diperbaiki atau blok silinder yang turun mesin ke bengkel bubut. Tak jarang, Haryadi harus berurusan dengan para sopir karena jumlah uang setoran yang kurang atau masalah STNK dan Buku Keur yang hilang atau terkena tilang.

Ayah Haryadi dikenal sebagai pribadi yang ulet dan pekerja keras. Sejak usia sangat muda, ia merantau dan bekerja di Jakarta mengikuti pamannya. Setelah bertahun-tahun bekerja untuk orang lain, ayahnya memutuskan untuk berwiraswasta di bidang angkutan umum, pekerjaan yang ia tekuni hampir sepanjang usia produktifnya. Ketika ayahnya terkena stroke, Haryadi dan saudara laki-lakinya harus mengambil alih usaha keluarga ini. Sebelumnya, ia juga kehilangan ibunya karena sakit, beberapa waktu setelah ia kembali dari Australia dengan membawa pulang baju wisuda.

“Repot juga ya ngurusin mobil dan sopir, belum lagi kalau

harus berurusan dengan petugas” kenangnya ketika harus berurusan dengan polantas, kejaksaan, dan hadir sebagai saksi di pengadilan karena Metro Mini-nya terkena tilang atau terjadi insiden di jalan.

Berasal dan tumbuh di lingkungan padat penduduk di salah satu kawasan Jakarta Barat, masa remaja Haryadi tidak jauh berbeda dengan anak-anak lainnya. Aktivitas sepulang sekolah ia isi dengan bermain sepak bola atau bersepeda bersama teman-teman. Untuk mengurangi waktu bermainnya yang berlebihan, orang tuanya mengirim Haryadi belajar agama di madrasah diniyah dekat rumah. Ia juga mengikuti les Bahasa Inggris, mengikuti jejak teman-temannya hingga menyelesaikan seluruh jenjangnya.

Sebagai mantan pegawai Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan, Haryadi bersyukur bisa melanjutkan studi di STAN-Prodip Keuangan, Jurangmangu, dan lulus pada tahun 1999. Di sela-sela pekerjaannya sebagai pegawai Kementerian Keuangan, ia melanjutkan studi S-1 di Program Extension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2003. Perkuliahan yang harus diikuti setiap sore setelah jam kerja memerlukan ketahanan fisik luar biasa, karena mengendarai roda dua menerobos kemacetan kota. Tak berhenti di situ, dengan semangat meningkatkan kompetensi, ia melanjutkan studi pasca sarjana di Monash University Australia, dengan beasiswa Australia Awards dan lulus pada tahun 2007. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Australia untuk menempuh pendidikan doktoral di Victoria University, yang ia selesaikan pada tahun





2016.

“Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa saya akan bersekolah dan tinggal di luar negeri,” ungkap pria berkacamata dengan tinggi 178 cm yang lahir pada 19 September 1978 ini.

Sang Orkestra Sektor Keuangan

Latar belakang pendidikan dan pengalamannya di bidang pasar modal, perbankan, asuransi, keuangan syariah, dan stabilitas sistem keuangan membuat Haryadi ditugasi untuk menangani pekerjaan strategis di BKF sebagai Koordinator Kelompok Kerja Asuransi

dan Kelembagaan Sistem Keuangan. Ia aktif dalam perumusan kebijakan, termasuk penyusunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan pada 12 Januari 2023. UU P2SK ini merupakan salah satu undang-undang dengan konsep *omnibus* yang menjadi *milestone* reformasi sektor keuangan di Indonesia.

Haryadi menghadapi tantangan besar pada awal tahun 2020, saat pandemi Covid-19 melanda dunia. Pandemi ini tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, tetapi juga menghentikan aktivitas sosial dan ekonomi. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi ancaman krisis tersebut. Di tengah kondisi ini, ia juga harus beradaptasi dengan perubahan internal akibat proses transformasi organisasi dan perubahan kepemimpinan.

Menyadari pentingnya literasi bagi kemajuan sebuah bangsa, Haryadi yang berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan rata-rata di kampung halamannya selalu menjadikan pendidikan sebagai cita-citanya.

“Gapai pendidikan setinggi-tingginya, agar engkau dipandang seadil-adilnya,” ujar ayah dari tiga anak itu.

Meskipun sudah meraih gelar doktor, ia sering terpikir untuk kembali bersekolah di bidang ilmu yang berbeda. Dorongan untuk berbagi ilmu

dan pengalaman inilah yang menginspirasi dalam berbagai aktivitas literasi, baik dalam program Kemenkeu Mengajar maupun *Employee Advocacy Program*. Semangat ini juga mendorongnya untuk berbagi ilmu saat menjalani tugas belajar kepada WNI yang telah berdomisili di Australia, termasuk literasi di bidang huruf dan bacaan Al-Qur'an.

Sebagai abdi negara, ia berharap semakin banyak pemuda Indonesia dapat berkontribusi untuk negara sesuai minat dan keahlian masing-masing. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki potensi unik, yang jika diarahkan dengan benar dapat membawa perubahan signifikan bagi bangsa ini. Terlebih di era digital saat ini, di mana pesan dan kebiasaan baik dapat disebarluaskan sehingga menginspirasi orang lain. Satu kalimat yang selalu memotivasinya adalah pesan Nabi Muhammad SAW, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

Haryadi berencana untuk menjalani penugasan di kantor pusat Bank Dunia, Washington D.C., mulai 1 November 2024. Semoga dalam peran barunya nanti, ia tetap dapat menjadi inspirasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Semoga semakin menyala Pak Har!



Fotografi, Bukan Sekadar Menangkap Momen

Bramantyo¹⁴

Anyone can cook, but only the fearless can be great". Sebuah petikan kalimat dari film *Ratatouille* ini sangat cukup berkesan. Menggambarkan bahwa setiap orang bisa melakukan atau menghasilkan sesuatu. Pun demikian dalam fotografi. Semua orang bisa memotret sekaligus membagikan hasil karya foto mereka. Dewasa ini, orang mudah sekali untuk memotret dan membagikan hasil potret di berbagai media. Dalam sehari mungkin bisa puluhan bahkan ratusan foto yang kita lihat. Terutama

dengan semakin majunya gawai dan berbagai media sosial yang memudahkan orang untuk berbagi dan melihat berbagai jenis tangkapan lensa.

Pertanyaannya, Bagaimana agar sebuah foto dapat memiliki nilai tambah?

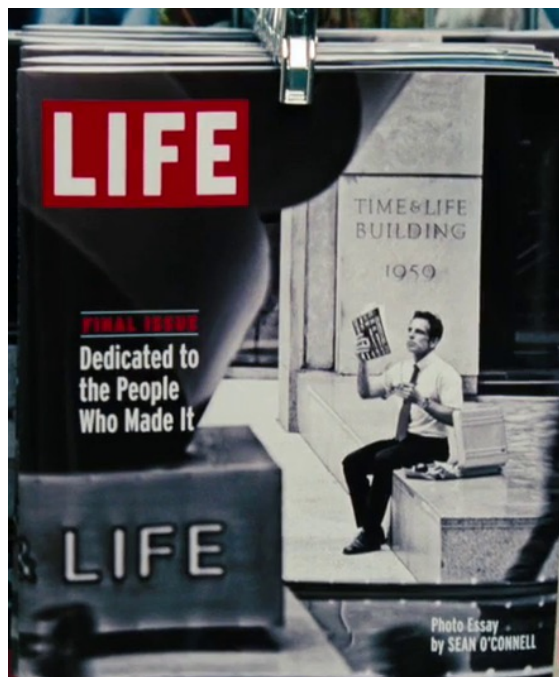
Fotografi sebagai Media Penyampaian Pesan

Salah satu keunggulan seni fotografi adalah kemampuan kamera untuk menangkap momen yang tidak mampu

dilihat dengan mata sehingga bisa menciptakan perspektif baru yang dapat menciptakan emosi tertentu. Seorang fotografer dituntut untuk mencari kekuatan dari sebuah gambar dengan mengantarkan maknanya secara jelas dan penuh perasaan.

Dalam film *The Secret Life of Walter Mitty*, Ben Stiller yang berperan sebagai bagian negatif foto, ia bertugas mengelola dan mencetak foto yang akan ditampilkan dalam edisi khusus majalah. Setelah mengalami berbagai petualangan berliku demi

¹⁴Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal



menemukan negatif foto dari fotografer yang hilang, tidak disangka pada akhirnya foto yang dipilih oleh sang fotografer justru menampilkan foto dirinya untuk tampil sebagai foto sampul majalah tersebut.

Dari film tersebut bisa diambil pelajaran bahwa seorang fotografer bisa mengangkat hal-hal yang tampak biasa di mata, namun bisa menjadi suatu hal yang luar biasa berkesan ketika sebuah momen diabadikan dalam sebuah gambar.

Dalam kaitan pekerjaan, fotografi bisa dimanfaatkan untuk memberikan *insight* yang berbeda. Tempat bekerja yang memproduksi berbagai kebijakan, cenderung mengukur keberhasilan suatu kebijakan di antaranya melalui angka-angka statistik. Di sini foto bisa dijadikan alat untuk memberikan perspektif

lain sehingga bisa menjadi bahan dalam diskusi untuk terus memperbaiki kebijakan yang dirumuskan.

Pada awal tahun 2018 saya melakukan perjalanan ke Ambon. Saat itu di Ambon baru memiliki Jembatan Merah Putih yang membentang di atas teluk Ambon. Kehadiran jembatan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena

mampu memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan. Namun, dibalik suksesnya pembangunan tersebut, tersisa warga yang terdampak. Para tukang perahu yang biasanya menyeberangi warga harus kehilangan para pelanggannya.

"Sebelum ada jembatan, saya sehari minimal dapat Rp100.000 dari menyeberangkan penumpang. Sekarang dapat Rp50.000 saja sulit." begitulah keluh kesahnya. Di sinilah kemudian muncul pemikiran bahwa tantangan pembangunan berikutnya adalah menjembatani mereka agar tidak tertinggal. Interaksi dengan masyarakat yang dilakukan selama proses pengambilan gambar bisa sekalian dimanfaatkan untuk menggali informasi atau pendapat masyarakat tentang implementasi kebijakan yang sedang berlangsung.

Pelajaran Berharga dari Fotografi

Banyak pelajaran yang berharga dari dunia fotografi. Seorang kawan pernah menyatakan, "Memotret itu selalu menyenangkan". Paling tidak hasil dari memotret adalah rasa puas dalam diri sendiri. Rasa senang dan puas muncul ketika berhasil mendapatkan foto yang bagus sesuai keinginan. Selanjutnya juga memotret melatih ketenangan dan fokus serta selalu berupaya mencari inspirasi untuk terus berkreasi.

Selain berbagai rasa yang ditimbulkan, terdapat pelajaran lain yang berharga. Fotografi tidak terlepas dari alatnya sendiri. Gambar yang baik bisa dihasilkan melalui kamera dengan teknologi yang canggih serta dengan berbagai jenis lensa yang memiliki karakter masing-masing. Perangkat kamera dengan segala kerumitan pengaturan dan sistem yang dimiliki, kemudian menjadi refleksi bahwa semua itu tidak ada artinya tanpa sistem optik yang paling canggih yang dimiliki oleh manusia, yaitu mata anugerah dari Sang Pencipta.



Berjaya dengan Amanah

Indrawan Susanto¹⁵ & Chintya Pramasanti¹⁶

Di sebuah kota kecil, pemuda bernama Rian bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi ternama. Dalam pekerjaannya, Rian sering kali berurusan dengan informasi rahasia, mulai dari rencana pembangunan hingga negosiasi kontrak dengan klien besar. Integritas dan kepercayaan adalah nilai-

nilai penting yang sangat perlu dijunjung tinggi dalam pekerjaannya.

Suatu hari, Rian diberi tugas penting oleh bosnya, Pak Indra. Proyek baru perusahaan adalah membangun hotel mewah di pusat kota. Rencana ini sangat rahasia, karena jika bocor, bisa saja menyebabkan spekulasi tanah

yang merugikan perusahaan. Rian diminta untuk mengawasi semua persiapan proyek ini dan menjaga kerahasiaannya.

Tak lama setelah proyek ini dimulai, Rian bertemu dengan teman lamanya, Andi, yang kini bekerja sebagai agen *real estate*. Berbincang tentang kenangan masa SMA dulu, Andi mulai menyelipkan

^{15,16}Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

pertanyaan tentang pekerjaan Rian dan proyek-proyek yang sedang dikerjakan perusahaannya.

“Rian, dengar-dengar perusahaanmu sedang mengerjakan proyek besar di pusat kota. Apa kamu bisa memberi sedikit bocoran? Bisa jadi informasi ini berguna untuk bisnisku. Nanti kalau usahaku untung, aku bagi untungnya juga sama kamu... tenang aja...” kata Andi dengan nada setengah bercanda. Rian tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, “Maaf, Ndi. Informasi proyek ini sangat rahasia. Aku tidak bisa membicarakannya, bahkan dengan teman baik sekalipun. Maaf, ya, sekali lagi... Kalau kamu benar temanku, kamu pasti *ngerti* posisiku...”

Andi mencoba mendesak lebih jauh, menawarkan makan malam mahal dan janji-janji manis lainnya, namun Rian tetap teguh pada pendiriannya. Dia tahu bahwa menjaga rahasia adalah bagian penting dari tanggung jawabnya, dan integritasnya tidak bisa dibeli. Dia tidak ingin mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Pak Indra dan perusahaan kepadanya.

Beberapa bulan kemudian, perusahaan Rian secara resmi mengumumkan proyek hotel mewah tersebut. Proyek itu mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat dan

para investor. Pak Indra, yang sangat bangga dengan keberhasilan ini, mengadakan perayaan kecil di kantor untuk seluruh tim. Dalam pidatonya, Pak Indra menekankan pentingnya kepercayaan dan menjaga rahasia.

“Sukses kita hari ini bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga karena kita memiliki orang-orang yang dapat dipercaya seperti Rian. Dia telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang luar biasa dalam menjaga rahasia perusahaan kita,” kata Pak Indra sambil menepuk pundak Rian.

Setelah acara selesai, Pak Indra mendekati Rian dan berbicara dengannya secara pribadi. “Rian, terima kasih atas kerja keras dan kesetiaanmu. Menjaga rahasia bukanlah tugas yang mudah, tapi kamu melakukannya dengan sangat baik. Kepercayaan adalah fondasi utama dari kesuksesan kita,” ucapnya dengan tulus.

Rian merasa sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa menjaga rahasia dan menjadi orang yang dapat dipercaya bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan integritas yang akan mendukung karir dan hubungan profesionalnya dalam jangka panjang.

Kisah Rian mengajarkan bahwa menjadi amanah adalah fondasi dari setiap hubungan profesional yang sukses. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan godaan untuk mengambil jalan pintas, integritas dan kepercayaan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan. Dengan menjaga kepercayaan, kita tidak hanya membangun reputasi yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan rasa saling percaya dan menghormati. [CP/IS]



Indonesia Berikan Bantuan Pelatihan *Liaison Officers* dan *Voluntary Officers* untuk Laos pada Persiapan 11th ASEAN Finance Ministers and Bank Governors' Meeting

Laos, (25/03/2024) – Kementerian Keuangan Indonesia dan Indonesian AID, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Laos menyelenggarakan program pelatihan untuk para *Liaison Officers* (LOs) dan *Voluntary Officers* (VOs) pada 25 Maret 2024, di Vientiane, Laos. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan Laos dalam menjalankan perannya sebagai pemangku kepentingan utama dalam penguatan agenda-agenda ASEAN. Selain itu, pelatihan ini merupakan persiapan pertemuan 11th ASEAN Finance Ministers and Bank Governors (11th AFMGM) pada bulan April 2024.

Pelatihan ini merupakan

implementasi dari Perjanjian Kerja Sama Hibah antara Pemerintah Indonesia dan Laos, yang ditujukan untuk memastikan kesuksesan ASEAN Finance Process dalam masa keketuaan Laos tahun ini. Pelatihan ini diharapkan dapat memoles kemampuan LOs dan VOs yang akan memainkan peran penting dalam pendampingan delegasi selama penyelenggaraan AFMGM di Luang Prabang, Laos. Bantuan ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia dalam mendukung keketuaan Laos.

Sesi-sesi pelatihan difasilitasi oleh para diplomat senior dari Kementerian Luar Negeri Indonesia serta difokuskan pada penyampaian pengetahuan dan keterampilan

penting yang diperlukan untuk memastikan kinerja LOs yang efektif. Lebih dari 35 peserta memperoleh wawasan tentang berbagai aspek, termasuk tanggung jawab LOs, protokol dan etika diplomatik, serta strategi komunikasi yang efektif. Selain itu, terdapat pula *sharing session* dari pegawai Kementerian Keuangan Indonesia yang sebelumnya bertugas sebagai LO pada Presidensi G20 2022 dan Keketuaan ASEAN Indonesia 2023.



Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Kebijakan Fiskal 2025

Jakarta, (20/05/2024) – Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 2024. KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya dan mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Dokumen KEM PPKF Tahun 2025 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 yang disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek, serta arah pembangunan ke depan.

“Kebijakan Fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas

2045. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi oleh semua bangsa dalam mencapai cita-citanya, tidak terkecuali Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pidato pengantar dan keterangan Pemerintah atas KEM PPKF 2025.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah berhasil mengantisipasi dan memitigasi tantangan yang datang silih berganti. Pada periode tersebut, eskalasi tensi geopolitik dan perang dagang menimbulkan fragmentasi global dan disrupti rantai pasok. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim mengancam kemanusiaan serta menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Di sisi lain, volatilitas harga komoditas dan dinamika sektor keuangan memunculkan tekanan pada pertumbuhan global.

Di tengah berbagai guncangan tersebut, Pemerintah melalui instrumen fiskal dan berbagai strategi kebijakan mampu menopang kinerja perekonomian Indonesia, termasuk antisipatif untuk mengatasi tantangan jangka panjang.

Di tahun 2025, penguatan ekonomi nasional diperkirakan terus berlanjut. KEM PPKF 2025 dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif terhadap perkembangan, namun tetap kredibel dan sustainable. KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas), serta harus berkelanjutan. Desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.



Gelar Skenario Fiskal, BKF Tingkatkan Pemahaman Pengelolaan APBN

Tangerang Selatan, (21/06/2024) – Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengadakan edukasi publik kepada civitas akademika tentang pentingnya arah kebijakan fiskal dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam proses penyusunan postur APBN. Kegiatan yang bertajuk Skenario Fiskal APBN: Sua, cengKERama, kelaNA dengan Fiskal kita dilaksanakan di sela-sela kegiatan belajar mengajar di Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan diikuti oleh lebih dari 400 mahasiswa/i yang terbagi ke dalam 20 kelas.

Penyelenggaraan Kelas Skenario Fiskal APBN di PKN STAN merupakan kali kedua setelah sebelumnya

dilaksanakan pada 21 Juli 2023. Berformat seperti kuliah, kegiatan ini dimulai dengan materi mengenai Arah dan Tantangan Kebijakan Fiskal tahun 2024-2025, dilanjutkan dengan Penjelasan tentang Kebijakan Fiskal, ADEM, dan Tools Simulasi APBN. Setelah mendapatkan pemaparan terkait materi tersebut, mahasiswa/i yang hadir kemudian diajak untuk melakukan Simulasi penyusunan APBN yang menjadi kegiatan utama dalam Skenario Fiskal ini.

Tidak hanya satu arah, kegiatan ini juga melibatkan partisipasi mahasiswa untuk langsung berdiskusi, menyampaikan saran, aspirasi, dan tanggapan terhadap proses penyusunan APBN. Salah satu mahasiswa yang hadir menyambut antusias dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. “Menurut saya acara ini bagus

karena kita dapat informasi langsung dari sumbernya (BKF) dan juga bikin kita itu jadi melek tentang keadaan fiskal di Indonesia,” tutur Ramadina, peserta Skenario Fiskal.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempertajam pemahaman mahasiswa/i terkait penyusunan dan pengelolaan APBN. “Menyusun APBN bukan hanya menyusun angka namun dibaliknya terdapat arah dan strategi untuk menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan kegiatan ini, kita harapkan mahasiswa tahu bagaimana APBN bekerja bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Sofia Arie Damayanty, Analis Kebijakan BKF, yang juga menjadi salah satu tutor Skenario Fiskal.



Inovasi Kebijakan dan Evaluasi Insentif Perpajakan Indonesia

Anggi Pratiwi¹⁷

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang besar bagi perekonomian di hampir seluruh negara di dunia. Indonesia kembali bangkit dari keterpurukannya yang terlihat dari keberhasilannya dalam mempertahankan kinerja

pertumbuhan ekonomi di atas 5% melalui program pemulihan ekonomi nasional, menurunnya tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan. Keberhasilan tersebut juga berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan di Indonesia.

Peran perpajakan menjadi instrumen fiskal yang sangat penting untuk optimalisasi pendapatan, pengaturan, redistribusi pendapatan, serta peningkatan daya saing. Dengan pentingnya peran pajak dalam keberhasilan Indonesia maka menjadi

¹⁷Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

tantangan bagi pemerintah dalam pencapaian perpajakan di tahun 2024 ini.

Buku ini membahas upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan pencapaian perpajakan di tahun 2024, seperti risiko dari perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama, perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrial, serta ekonomi hijau. Salah satu upaya pemerintah tersebut ialah melalui insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta mengakselerasi transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Pada buku ini terdapat 9 artikel yang membahas terkait isu-isu insentif perpajakan.

Artikel pertama pada buku ini ialah **Analisis Biaya-Manfaat Kebijakan Insentif Fiskal di Industri Pengolahan Mineral: Mempromosikan industri hilir timah di Kepulauan Bangka Belitung**. Artikel ini membahas mengenai kebijakan hilirisasi mineral yang telah diberlakukan kebijakan insentif fiskal oleh pemerintah sejak 2014 bagi para produsen mineral yang berinvestasi dalam fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri berupa *tax allowance* (TA). Artikel ini akan mengulik analisis biaya dan manfaat dari kebijakan hilirisasi mineral tanpa dan dengan insentif fiskal yang diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada kesejahteraan daerah

produsen utama nasional.

Artikel kedua pada buku ini ialah **Evaluasi Dampak Insentif Perpajakan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Indonesia Jangka Menengah dan Panjang**, yang akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berjalan dengan lambat. Hal ini terlihat dari Indonesia yang terjebak dalam *Middle Income Trap* selama 29 tahun terakhir. Perlu adanya intervensi kebijakan insentif perpajakan yang efektif dalam perspektif jangka pendek, menengah, dan panjang. Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak insentif perpajakan dalam mendukung transformasi ekonomi berdasarkan dua perspektif, yaitu (1) perspektif makro pembangunan dengan melihat dampak insentif perpajakan terhadap variabel makro pembangunan, dan (2) perspektif fiskal dengan melihat dampak penerapan insentif perpajakan terhadap indikator fiskal itu sendiri.

Artikel ketiga pada buku ini ialah **Apakah Insentif Pajak dapat Menstimulus Pertumbuhan Ekonomi dan Masa Depan Bisnis? (Studi pada Negara di Kawasan Asia Tenggara)** yang membahas mengenai analisis secara empiris terkait pengaruh insentif pajak terhadap pertumbuhan ekonomi serta investasi secara langsung. Dalam artikel ini juga diberikan beberapa rekomendasi kebijakan terkait

insentif pajak serta strategi khusus dari pemerintah dalam mendorong wajib pajak non-perusahaan agar patuh kepada kebijakan perpajakan.

Insentif Pajak Pembiayaan Hijau dan Kredit Hijau: Simulasi pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia merupakan artikel keempat dalam buku ini, yang mengulas mengenai peran insentif pajak pembiayaan sektor hijau yang disimulasikan pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau. Dalam artikel ini terdapat beberapa hasil uji penelitian dan rekomendasi kebijakan.

Artikel selanjutnya ialah **Mendorong Pertumbuhan UMKM Hijau: Penyelarasan Model Insentif Ekonomi dan Inovasi Berkelanjutan** yang membahas mengenai analisis peralihan UMKM ke bisnis yang berorientasi pada lingkungan dan menemukan bahwa kesadaran lingkungan, hubungan kemitraan, serta dukungan pemerintah berupa insentif pajak dan pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap inovasi hijau hingga peralihan ke bisnis hijau. Pada artikel ini juga akan dibahas mengenai fondasi pengembangan model hingga rekomendasi kebijakan terkait praktik bisnis hijau UMKM.

Artikel keenam pada buku ini ialah **Determinasi Transisi Teknologi Perpajakan Nasional dan Perilaku Wajib**



Pajak dalam Kinerja Bisnis UMKM Indonesia: Analisis Pemodelan Regresi PLS-SEM mengulas mengenai insentif pajak yang memiliki potensi meningkatkan peran UMKM dalam menjadikan perekonomian negara lebih maksimal dan mengintegrasikan reformasi sistem perpajakan. Pada artikel ini juga terdapat rekomendasi kebijakan yang diusulkan bagi pemerintah dan sektor UMKM di Indonesia.

Analisis Dampak Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dan Kinerja Ekonomi: Studi Empiris Pada UKM di Indonesia menjadi artikel ketujuh yang ada dalam buku ini, yang menjelaskan tentang pengaruh dari insentif pajak terhadap kepatuhan pajak dan kinerja ekonomi pada UKM di Indonesia dengan

menggunakan pendekatan studi empiris pada UKM yang bergerak di berbagai sektor melalui survei. Terdapat juga usulan rekomendasi kebijakan insentif pajak yang dapat diberikan kepada UKM untuk mendorong pengembangan bisnis yang dapat dipilih berdasarkan kondisi dan tujuannya.

Rethinking Indonesia Tax Incentives in Post-Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 Era merupakan artikel kedelapan dalam buku ini yang membahas mengenai insentif pajak di Indonesia pasca-era BEPS 2.0, serta insentif apa saja yang perlu untuk ditinjau ulang setelah era BEPS 2.0. Pada artikel ini juga terdapat usulan rekomendasi kebijakan berdasarkan penilaian insentif pajak yang dilakukan.

Artikel Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Saniter Menstruasi Sebagai Kebijakan Pengarusutamaan Gender merupakan artikel terakhir dalam buku ini yang membahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dirasa kurang mendukung kesetaraan substantif bagi wanita karena akan menimbulkan beban pajak yang lebih tinggi dan hal tersebut dapat menimbulkan perubahan perilaku yang mengarah pada penghematan alokasi pengeluaran produk saniter menstruasi dan mengurangi frekuensi penggantian sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan reproduksi. Sementara itu berdasarkan hasil penelitian, di Indonesia menunjukkan masih sangat rendah praktik manajemen kebersihan menstruasi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan hingga akses yang sulit terhadap saniter menstruasi. Pada artikel ini juga dibahas terkait evaluasi dan usulan rekomendasi kebijakan berupa dua opsi fasilitas PPN yang dapat diterapkan.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca sebagai referensi dalam melakukan analisis, penelitian lebih lanjut, serta dapat menjadi dasar pengambil keputusan atau kebijakan terkait insentif perpajakan Indonesia. Selamat membaca!

Glosarium

Bauran pendanaan (*blended finance*) adalah penggunaan strategi pembiayaan pembangunan untuk memobilisasi pembiayaan tambahan menuju pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Sering kali juga disebut pendanaan campuran adalah strategi yang menggabungkan modal dengan berbagai tingkat risiko untuk mengkatalisasi pembiayaan yang mencari suku bunga pasar yang disesuaikan dengan risiko ke dalam investasi berdampak.

CAGR – Compound Annual Growth Rate adalah tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu. CAGR digunakan untuk memuluskan (*smoothing*) tingkat pertumbuhan per tahun yang berbeda-beda selama periode rentang waktu tertentu.

Crude palm oil (CPO) – minyak kelapa sawit mentah merupakan salah satu komoditas utama Indonesia yang memiliki peran penting dalam industri makanan, energi, dan domestik di seluruh dunia. Minyak ini diperoleh melalui proses ekstraksi dari daging buah kelapa sawit.

Climate Budget Tagging (CBT) merupakan proses untuk mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membuat *output* yang spesifik ditujukan untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan tujuan untuk mengetahui porsi pendanaan publik untuk kegiatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam APBN. Selanjutnya tujuan utama dari CBT ini adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah.

Common Agricultural Policy (CAP) adalah kebijakan pertanian yang diterapkan oleh Uni Eropa (UE) untuk mendukung sektor pertanian dan pedesaan di seluruh negara anggotanya. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan bantuan kepada petani, memastikan pasokan makanan yang stabil dan berkualitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Deforestasi suatu kondisi luas hutan yang mengalami penurunan, yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Terjadinya deforestasi mengakibatkan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, kerusakan sistem sumber daya air, sampai dengan

kehilangan berbagai jenis flora dan fauna.

Efek rumah kaca adalah proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer sehingga sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Hal ini disebabkan oleh berbagai zat yang ada di permukaan bumi.

Fed fund rate oleh bank sentral US – suku bunga dana federal adalah suku bunga yang dikenakan pada pinjaman jangka pendek antara bank-bank di Amerika Serikat yang dilakukan dalam pasar dana federal. Suku bunga ini ditetapkan oleh *Federal Reserve*, bank sentral AS dan merupakan salah satu alat utama kebijakan moneter yang digunakan untuk mempengaruhi kondisi ekonomi

Fiscal buffer sebuah istilah yang merujuk pada cadangan atau penyangga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi atau keuangan di masa depan. Pada umumnya, *fiscal buffer* ini berupa dana cadangan yang disimpan untuk mengatasi potensi defisit anggaran, krisis ekonomi, atau pengeluaran tak terduga.

Least developed countries

(LDCs) adalah negara-negara dengan tingkat pembangunan ekonomi yang sangat rendah dan memiliki tantangan besar dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi. LDCs biasanya menghadapi kombinasi masalah seperti kemiskinan, infrastruktur yang buruk, ketidakstabilan politik, dan keterbatasan sumber daya.

Middle income trap adalah istilah ekonomi yang merujuk pada situasi di mana suatu negara mengalami kesulitan dalam transisi dari status pendapatan menengah (*middle income*) menjadi pendapatan tinggi (*high income*). Negara-negara yang terjebak dalam *middle income trap* sering kali mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi setelah mencapai tingkat pendapatan menengah dan sulit mencapai tingkat pendapatan tinggi seperti negara-negara maju.

PDRI – Pajak Dalam Rangka Impor adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang. PDRI terdiri dari beberapa jenis pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

Penyertaan Modal Negara

(PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/atau

perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Retribusi split-gas tingkat pertanian adalah suatu mekanisme atau kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian emisi gas rumah kaca di sektor pertanian sehingga dapat mengurangi perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas metana dan nitro oksida yang sering dihasilkan dari kegiatan pertanian.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi SiLPA/SiKPA (selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama satu periode laporan) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Sovereign Wealth Fund

(SWF) adalah kendaraan finansial yang dimiliki oleh negara yang memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam.

Secara sederhana, SWF adalah Tabungan negara, kelebihan dana yang dimiliki oleh negara yang diinvestasikan dengan tujuan untuk *return* yang lebih besar lagi. Dengan adanya SWF diharapkan tidak ada penerimaan negara yang *idle* dan tidak dimanfaatkan.

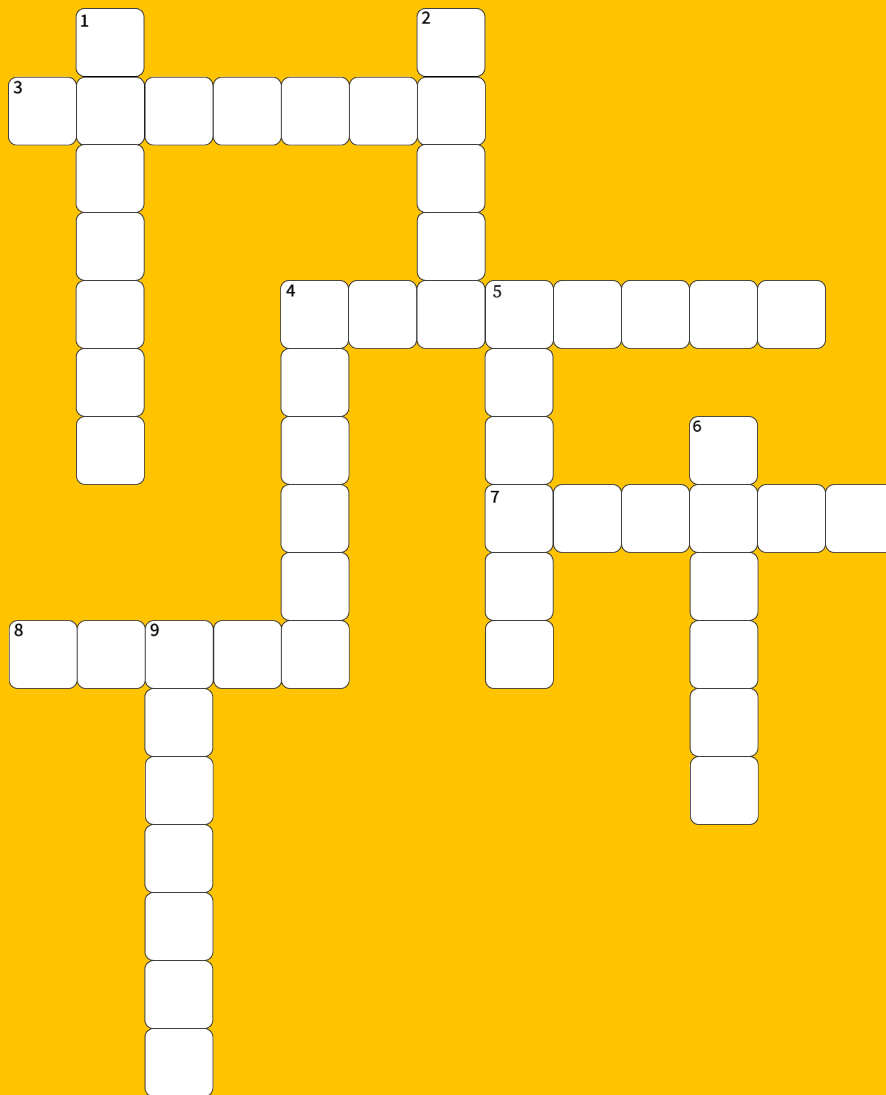
Special Mission Vehicle (SMV)

dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan di luar fungsi pengelolaan fiskal utama/rutin. SMV juga dibentuk untuk mendukung investasi pemerintah dan penyediaan barang dan sarana publik yang dibutuhkan secara sosial ekonomi meskipun tidak menguntungkan secara bisnis/komersil. Beberapa SMV yang ada di Indonesia, PT Penjaminan Infrastruktur (PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Tujuan Pembangunan**Berkelanjutan (TPB)/****Sustainable Development**

Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 tujuan sampai tahun 2030. 17 tujuan TPB dikelompokkan ke dalam empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata Kelola.

Quiz FISKAL!



Mendatar

- 3 Selisih antara pendapatan dan belanja
- 4 Taksiran
- 7 Olahan ayam khas Bali
- 8 Serangga penghasil madu

Menurun

- 1 Kesempatan (Sinonim)
- 2 Kewajiban
- 4 Dapat dipercaya
- 5 Domestik (Antonim)
- 6 Bertambah besar
- 9 Pengeluaran

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, pemenang akan diumumkan pada edisi selanjutnya

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id

Pemenang Kuis Edisi I/2024:

- 1. Farkhan Abdillah
- 2. Nisa Afrina
- 3. Yuniyarti



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id